



**ANALISIS BELANJA DAERAH SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN
DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN PENYERAPAN TENAGA
KERJA DI KABUPATEN LANGKAT PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan**

Oleh :

DWI SYAHPUTRA SURBAKTI

1515210148

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DWI SYAHPUTRA SURBAKTI
NPM : 1515210148
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS BELANJA DAERAH SEKTOR
PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN
INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENYERAPAN
TENAGA KERJA DI KABUPATEN LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

LANGKAT, AGUSTUS 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(BAKHTIAR EFENDI, SE., M.Si)



PEMBIMBING I

(LIA NAZLIANA NASUTION, SE., M.Si)

PEMBIMBING II

(RAHMAD SEMBIRING, SE., M.SP)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : DWI SYAHPUTRA SURBAKTI
NPM : 1515210148
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS BELANJA DAERAH SEKTOR
PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN
INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENYERAPAN
TENAGA KERJA DI KABUPATEN LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

LANGKAT, AGUSTUS 2021

KETUA

(Uswatun Hasanah, SE., M.Si)

ANGGOTA - I

(Lia Nazliana Nasution, SE., M.Si)

ANGGOTA - II

(Rahmad Sembiring, SE., M.SP)

ANGGOTA - III

(Ade Novalina, SE., M.Si)

ANGGOTA - IV

(Bakhtiar Efendi, SE., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : DWI SYAHPUTRA SURBAKTI
NPM : 1515210148
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS BELANJA DAERAH SEKTOR
PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN
INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENYERAPAN
TENAGA KERJA DI KABUPATEN LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media / formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari bahwa pernyataan ini tidak benar,



Langkat, Agustus 2021

[Signature]
DWI SYAHPUTRA SURBAKTI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : DWI SYAHPUTRA SURBAKTI

NPM : 1515210148

FAKULTAS : SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN

ALAMAT : DSN. II SUKA BERBAKTI

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa mendatang,

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya

Langkat, Agustus 2021



DWI SYAHPUTRA SURBAKTI



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : DWI SYAHPUTRA SURBAKTI
 Tempat/Tgl. Lahir : SUKA BERBAKTI / 07 Desember 1996
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515210148
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 Konsentrasi : Ekonomi Publik & SDA
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.31
 Nomor Hp : 081362280330
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Pengaruh Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Corot Yang Tidak Perlu

Rektor I

 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 14 November 2019

Pemohon,

 (Dwi Syahputra Surbakti)

Tanggal :
 Disahkan oleh
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Lia Nazliana Nasution, SE., M.Si)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Ekonomi Pembangunan

 (Bakhtiar Efendi, SE., M.Si.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Rahmat Sembiring, SE., M.SP)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4120/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
ma saudara/i:

: DWI SYAHPUTRA SURBAKTI

: 1515210148

/Semester : Akhir

as : SOSIAL SAINS

n/Prodi : Ekonomi Pembangunan

sannya terhitung sejak tanggal 05 Mei 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus
gi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 05 Mei 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01

isi : 01

Efektif : 04 Juni 2015

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : DWI SYAHPUTRA SURBAKTI
N. P. M : 1515210148
Tempat/Tgl. Lahir : SUKA BERBAKTI 07/12/1996 / 7 desember 1996
Alamat : DSN II SUKA BERBAKTI
No. HP : 081362280330
Nama Orang Tua : Bangun Surbakti/Rami, S.Pd
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul : Pengaruh Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

5 Mei 2021
buat Pernyataan



DWI SYAHPUTRA SURBAKTI
1515210148

Plagiarism Detector v. 1884 - Originality Report 4/28/2021 10:34:45 AM

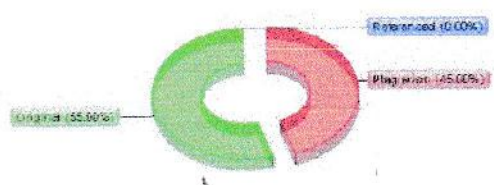
File: D:\SYAHPUTRA\URBAKTI_1515210148_EKONOMI PEMBANGUNAN.docx Uploaded to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Comparison Method: Rewrite Unchecked language
Check type: Internet Check



Detailed document analysis

Plagiarism chart



Distribution plot



SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DWI SYAHPUTRA SURBAKTI
NPM : 1515210148
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tingkat Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Rahmad Sembiring, SE.,M.SP
Judul Skripsi : Analisis Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
03 Juli 2020	pada proposal yang telah kamu kirim ke saya ada beberapa revisi : 1. daftar pustaka di lampirkan 2. di tambahkan referensi jurnal internasional yg terkait variabel kamu 3. masukkan jurnal jurnal yg telah bapak rekomendasikan ke kamu	Revisi	
15 September 2020	Layak untuk sempro	Disetujui	
15 September 2020	Acc sempro	Disetujui	
17 Maret 2021	oke acc sempro	Disetujui	
17 Maret 2021	acc sminar hasil	Disetujui	
27 April 2021	Acc meja hijau	Disetujui	

Medan, 08 Oktober 2021
Dosen Pembimbing,



Rahmad Sembiring, SE.,M.SP



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
 MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DWI SYAHPUTRA SURBAKTI
 NPM : 1515210148
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu
 Dosen Pembimbing : Lia Nazliana Nasution, SE., M.Si
 Judul Skripsi : Pengaruh Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
14 September 2020	judul grafik belum sesuai dengan apa yg sudah disarankan	Revisi	
14 September 2020	acc seminar proposal	Disetujui	
28 Maret 2021	lebih diperjelas pengaruh antar variabel, seperti alasan mengapa infrastruktur bisa berhubungan negatif.	Revisi	
28 Maret 2021	ACC SIDANG MEJA HIJAU	Disetujui	

Medan, 29 Maret 2021
 Dosen Pembimbing,



Lia Nazliana Nasution, SE., M.Si

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 06 Mei 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI SYAHPUTRA SURBAKTI
Tempat/Tgl. Lahir : SUKA BERBAKTI / 7 desember 1996
Nama Orang Tua : Bangun Surbakti
N. P. M : 1515210148
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
No. HP : 081362280330
Alamat : DSN II SUKA BERBAKTI

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Pengaruh Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,000,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



DWI SYAHPUTRA SURBAKTI
1515210148

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



ACC

ACC Jilid Lux
1/10/2021

**ANALISIS BELANJA DAERAH SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN
DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN PENYERAPAN TENAGA
KERJA DI KABUPATEN LANGKAT PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh :

DWI SYAHPUTRA SURBAKTI

1515210148

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan analisis data dengan metode Path Analysis (Analisis Jalur) dengan menggunakan aplikasi SPSS yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini Path Analysis digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap IPM dan Penyerapan Tenaga Kerja. Yang menjadi pembeda antara pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung ialah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai intervening, atau yang memediasi antara Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur dengan Penyerapan tenaga kerja. Data yang digunakan dalam penelitian ini di ambil dari tahun 2012 sampai dengan 2018, dengan kurun waktu 7 tahun. Terdapat 3 tempat pengambilan data dalam skripsi ini (1) dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat, (2) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat, (3) BPS Kabupaten Langkat. Dari hasil penelitian di dapatlah sebuah hasil yang menunjukkan bahwa Infrastruktur memiliki pengaruh yang negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Penyerapan Tenaga Kerja, baik di lihat secara pengaruh langsung maupun tidak langsung, dan secara parsial maupun secara simultan. Artinya bahwa Infrastruktur tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Penyerapan Tenaga kerja, tetap memiliki pengaruh namun memang tidak signifikan atau pengaruh yang sangat kecil. Dalam hal ini Infrastruktur tidak dapat langsung dirasakan dalam jangka pendek maupun dirasakan secara langsung, melainkan Infrastruktur mempengaruhi Sektor lain seperti, pertanian, industri, pariwisata, dan lain sebagainya yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Dan Penyerapan Tenaga Kerja.

Kata kunci : Analisis Jalur, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, IPM, Penyerapan
Tenaga Kerja

ABSTRACT

Writing this thesis aims to explain data analysis using the Path Analysis method using the SPSS application which is then used to analyze Regional Expenditures for the Education, Health and Infrastructure Sector against the Human Development Index and Labor Absorption in Langkat Regency, North Sumatra Province. In this study, Path Analysis is used to determine the magnitude of the direct and indirect influence of the Education, Health and Infrastructure Sectors on HDI and Labor Absorption. What makes the difference between direct and indirect effects is the Human Development Index. The Human Development Index is used as intervening, or which mediates between the Education, Health and Infrastructure Sectors with labor absorption. The data used in this study were taken from 2012 to 2018, with a period of 7 years. There are 3 data collection places in this thesis (1) Langkat Regency Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), (2) Langkat Regency Manpower Office, (3) BPS Langkat Regency. From the research results, there is a result that shows that infrastructure has a negative influence on the Human Development Index and Labor Absorption, both seen directly and indirectly, and partially and simultaneously. This means that infrastructure does not have a significant effect on the Human Development Index and Labor Absorption, it still has an effect but it is not significant or has a very small effect. In this case, infrastructure cannot be directly felt in the short term or felt directly, but infrastructure affects other sectors such as agriculture, industry, tourism, etc. which in the end will also affect the Human Development Index and Labor Absorption.

Keywords: Path Analysis, Education, Health, Infrastructure, HDI, Absorption Labor

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang di susun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan tugas akhir untuk dapat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Adapun judul yang penulis sajikan adalah sebagai berikut : **"Analisis Belanja Daerah sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara"**.

Dalam kesempatan ini, penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.kn, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Bakhtiar Efendi, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Lia Nazliana Nasution, SE., M.Si, selaku dosen pembimbing I penulis yang sudah banyak memberikan arahan, motivasi serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Rahmad Sembiring, SE., M.SP, selaku dosen pembimbing II penulis yang sudah memberikan banyak saran, masukan, motivasi, serta kemudahan di dalam pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah mengajarkan ilmunya selama perkuliahan di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Seluruh Staff pegawai Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Kepada Orang tua saya yang telah memberikan nasihat, arahan dan materi sehingga dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
9. Serta kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi-motivasi dalam perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu ataupun wawasan bagi mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi dan semoga skripsi ini membawa manfaat dan berguna bagi pembacanya.

Langkat, Agustus 2021

Penulis

DWI SYAHPUTRA SURBAKTI
1515210148

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	17
C. Batasan Masalah.....	17
D. Rumusan Masalah	18
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	18
F. Keaslian Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	21
1. Penyerapan Tenaga Kerja	21
2. Indeks Pembangunan Manusia.....	23
3. Komponen Pembangunan Manusia	24
4. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia	28
5. Belanja Daerah	29
6. Belanja Daerah Dalam Sektor Pendidikan.....	31
7. Belanja Daerah Dalam Sektor Kesehatan	35
8. Belanja Daerah Dalam sektor Infrastruktur	37
B. Penelitian Terdahulu.....	41
C. Kerangka Konseptual	53
D. Hipotesis	54
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	55
B. Tempat dan Waktu Penelitian	55
C. Definisi Operasional Variabel.....	56
D. Populasi.....	57
E. Jenis dan Sumber Data	57
F. Teknik Pengumpulan Data.....	58
G. Metode Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	60
1. Sejarah Kabupaten Langkat	60
2. Iklim Dan Wilayah	63
3. Sarana Prasarana Kabupaten Langkat	66
B. Gambaran Hasil Penelitian	68
1. Pengeluaran Pemerintah.....	68

C. Hasil Penelitian	73
1. Interpretasi Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	75
2. Interpretasi Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	85
3. Interpretasi Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Indeks Pembangunan Manusia	90
4. Interpretasi Kesehatan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Indeks Pembangunan Manusia	94
5. Interpretasi Infrastruktur Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Indeks Pembangunan Manusia	97
D. Pembahasan.....	99
1. Belanja daerah sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Indeks pembangunan Manusia di Kabupaten Langkat.	99
2. Belanja daerah sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Langkat.....	101
3. Belanja daerah sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Langkat	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
DAFTAR LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat	5
Tabel 1.2 Belanja Daerah Kabupaten Langkat.....	7
Tabel 1.3 Realisasi Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur (Dalam Rupiah), Indeks Pembangunan Manusia dan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Langkat	9
Tabel 1.4 Originalitas Penelitian	21
Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu	41
Tabel. 3.1 Jadwal Penelitian.....	55
Tabel. 3.2 Definisi Operasional dan Indikator	56
Tabel 4.1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Langkat.....	65
Tabel 4.2 Jumlah Fasilitas Pendidikan.....	67
Tabel 4.3 Jumlah Fasilitas Kesehatan	67
Tabel 4.4 Prasarana Jalan Kabupaten Langkat Berdasarkan Kondisi (km)	68
Tabel 4.5 Total Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2012-2018 (Dalam Rupiah)	69
Tabel 4.6 Total Realisasi Belanja Daerah Sektor Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun 2012-2018 (Dalam Rupiah)	70
Tabel 4.7 Total Realisasi Belanja Daerah Sektor Kesehatan Kabupaten Langkat Tahun 2012-2018 (Dalam Rupiah)	71
Tabel 4.8 Total Realisasi Belanja Daerah Sektor Infrastruktur Kabupaten Langkat Tahun 2012-2018 (Dalam Rupiah)	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat	6
Gambar 1.2 Belanja Daerah Kabupaten Langkat	8
Gambar 1.3 Realisasi Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur 2012-2018	10
Gambar 2.2. Kerangka Konseptual.....	53
Gambar 4.1. Kerangka Konseptual.....	73
Gambar 4.2. Analisis Jalur Pengaruh Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui IPM.....	91
Gambar 4.3. Analisis Jalur Pengaruh Kesehatan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui IPM.....	95
Gambar 4.4. Analisis Jalur Pengaruh Infrastruktur Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui IPM.....	98

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Langkat

Kabupaten Langkat adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatra Utara, Indonesia. Ibu kotanya berada di Stabat. Kabupaten Langkat terdiri dari 23 Kecamatan dengan luas 6.273,29 km² dan berpenduduk sejumlah 1.041.775 jiwa (2020). Nama Langkat diambil dari nama Kesultanan Langkat yang dulu pernah ada di tempat yang kini merupakan kota kecil bernama Tanjung Pura, sekitar 20 km dari Stabat. Mantan wakil presiden Adam Malik pernah menuntut ilmu di sini. Pada masa Pemerintahan Belanda, Kabupaten Langkat masih berstatus keresidenan dan kesultanan (kerajaan) dengan pimpinan pemerintahan yang disebut Residen dan berkedudukan di Binjai dengan Residennya Morry Agesten. Residen mempunyai wewenang mendampingi Sultan Langkat di bidang orang-orang asing saja sedangkan bagi orang-orang asli (pribumi/ bumiputera) berada di tangan pemerintahan kesultanan Langkat.

Kesultanan Langkat berturut-turut dijabat oleh:

1. Sultan Haji Musa Almahadamsyah 1865-1892,
2. Sultan Tengku Abdul Aziz Abdul Jalik Rakhmatsyah 1893-1927
3. Sultan Mahmud 1927-1945/46

Di bawah pemerintahan Kesultanan dan Assisten Residen struktur pemerintahan disebut LUHAK dan di bawah luhak disebut Kejuruan (Raja kecil) dan Distrik, secara berjenjang disebut Penghulu Balai (Raja Kecil Karo) yang berada di desa. Pemerintahan Luhak dipimpin seorang Pangeran, Pemerintahan Kejuruan dipimpin seorang Datuk, Pemerintahan Distrik dipimpin seorang kepala Distrik, dan untuk jabatan kepala kejuruan/Datuk harus dipegang oleh penduduk asli yang pernah menjadi raja di daerahnya. Pemerintahan Kesultanan di Langkat dibagi atas 3 (tiga) kepala Luhak, yakni:

1. Luhak Langkat Hulu, Berkedudukan di Binjai dipimpin oleh T.Pangeran Adil. Wilayah ini terdiri dari 3 Kejuruan dan 2 Distrik yaitu: Kejuruan Selesai,Kejuruan Bahorok,Kejuruan Sei Bingai,Distrik Kwala,Distrik Salapian.
2. Luhak Langkat Hilir Berkedudukan di Tanjung Pura dipimpin oleh Pangeran Tengku Jambak/ T. Pangeran Ahmad. Wilayah ini mempunyai 2 kejuruan dan 4 distrik yaitu: Kejuruan Stabat,Kejuruan Bingei,Distrik Secanggang,Distrik Padang Tualang,Distrik Cempa,Distrik Pantai Cermin
3. Luhak Teluk Haru Berkedudukan di Pangkalan Berandan dipimpin oleh Pangeran Tumenggung (Tengku Djakfar). Wilayah ini terdiri dari satu kejuruan dan dua distrik.
Kejuruan Besitang meliputi Langkat Tamiang dan Salahaji, Distrik Pulau Kampai,Distrik Sei Lapan.

Awal 1942, kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda beralih ke Pemerintahan Jepang, namun sistem pemerintahan tidak mengalami perubahan, hanya sebutan Keresidenan berubah menjadi SYU, yang dipimpin oleh Syucokan. Afdeling diganti dengan Bunsyu dipimpin oleh Bunsyuc. Kekuasaan Jepang ini berakhir pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17-08-1945.

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatra dipimpin oleh seorang Gubernur yaitu Mr. Teuku Muhammad Hasan, sedangkan Kabupaten Langkat tetap dengan status keresidenan dengan asisten residennya atau kepala pemerintahannya dijabat oleh Tengku Amir Hamzah, yang kemudian diganti oleh Adnan Nur Lubis dengan sebutan Bupati.

Pada tahun 1947-1949, terjadi agresi militer Belanda I, dan II, dan Kabupaten Langkat terbagi dua, yaitu Pemerintahan Negara Sumatra Timur (NST) yang berkedudukan di Binjai dengan kepala pemerintahannya Wan Umaruddin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di Pangkalan Berandan, dipimpin oleh Tengku Ubaidulah. Berdasarkan PP No.7 Tahun 1956 secara administratif Kabupaten Langkat menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya (Bupati) Netap Bukit.

Mengingat luas Kabupaten Langkat, maka Kabupaten Langkat dibagi menjadi 3 (tiga) kewedanan yaitu:

1. Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di Binjai
2. Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura
3. Kewedanan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Berandan.

Pada tahun 1963 wilayah kewedanan dihapus sedangkan tugas-tugas administrasi pemerintahan langsung di bawah Bupati serta Assiten Wedana (Camat) sebagai perangkat akhir.

2. Iklim Dan Wilayah

IKLIM

Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Langkat termasuk daerah yang beriklim tropis. Sehingga daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.

Iklim di wilayah Kabupaten Langkat termasuk tropis dengan indikator iklim sebagai berikut :

- ✓ Musim Kemarau : Februari s/d Agustus
- ✓ Musim Hujan : September s/d Januari
- ✓ Curah hujan rata-rata 2.205,43 mm/tahun
- ✓ Suhu rata-rata 28 derajat celcius - 30 derajat celcius

WILAYAH

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang berada di Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Langkat berada pada $3^{\circ} 14' 00''$ - $4^{\circ} 13' 00''$ Lintang Utara, $97^{\circ} 52' 00''$ - $98^{\circ} 45' 00''$ Bujur Timur dan 4 - 105 m dari permukaan laut.

Kabupaten Langkat menempati area seluas +- 6.263,29 Km² (626.329 Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan Definitif. Area Kabupaten Langkat di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo, di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Aceh, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai.

Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Langkat, luas daerah terbesar adalah kecamatan Bahorok dengan luas 1.101,83 Km² atau 17,59 persen diikuti kecamatan Batang Serangan dengan luas 899,38 Km² atau 14,36 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah kecamatan Binjai dengan luas 42,05 Km² atau 0,67 persen dari total luas wilayah Kabupaten Langkat.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Langkat

No.	Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Rasio terhadap Total (%)
1	Bahorok	1 101,83	17,59
2	Serapit	98,50	1,57
3	Salapian	221,73	3,54
4	Kutambaru	236,84	3,78
5	Sei. Bingei	333,17	5,32
6	Kuala	206,23	3,29
7	Selesai	167,73	2,68
8	Binjai	42,05	0,67
9	Stabat	108,85	1,74
10	Wampu	194,21	3,10
11	Batang Serangan	899,38	14,36
12	Sawit Seberang	209,10	3,34
13	Padang Tualang	221,14	3,53
14	Hinai	105,26	1,68
15	Secanggang	231,19	3,69
16	Tanjung Pura	179,61	2,87
17	Gebang	178,49	2,85
18	Babalan	76,41	1,22
19	Sei. Lapan	280,68	4,48
20	Brandan Barat	89,80	1,43
21	Besitang	720,74	11,51
22	Pangkalan Susu	151,35	2,42
23	Pematang Jaya	209,00	3,34
Jumlah		6 263,29	100,00

Wilayah kabupaten Langkat meliputi:

- ✓ Kawasan hutan lindung seluas +- 266.232 Ha (42,51 %) dan kawasan lahan budidaya seluas +- 360.097 Ha (57,49 %).
- ✓ Kawasan hutan lindung terdiri dari kawasan pelestarian alam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) seluas +- 213.985 Ha.
- ✓ Kawasan Timur Laut seluas +- 9.520 Ha.
- ✓ Kawasan Penyangga seluas +- 7.600 Ha.
- ✓ Kawasan Hutan Bakau seluas +- 20.200 Ha dan kawasan lainnya +- 14.927 Ha.

3. Sarana Prasarana Kabupaten Langkat

a. Fasilitas Pendidikan

Tingkat suatu produktivitas dan kompetensi seseorang sangatlah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil yang diikuti dengan rasa percaya diri seseorang serta sikap dan perilaku yang inovatif. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2015 jumlah fasilitas bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Jumlah Fasilitas Pendidikan

Tingkat Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
SD	596	177	773
SMP	66	218	284
SMA	21	97	118
SMK	3	69	72

Sumber :BPS Kabupaten Langkat

b. Fasilitas Kesehatan

Dalam meningkatkan fasilitas bidang kesehatan didalam mengatasi masalah kesehatan maka Kabupaten Langkat selalu meningkatkan pelayanan dengan berbagai upaya dalam pengadaan sarana dan prasarana kesehatan pada tahun 2015 diantaranya yaitu, rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, posyandu, klinik/balai kesehatan, pustu (pusat kesehatan masyarakat pembantu).

Tabel 4.3 Jumlah Fasilitas Kesehatan

Tahun	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik/Balai Kesehatan	Pustu	Jumlah
2015	3	27	30	1.308	100	171	1.639

Sumber : BPS Kabupaten Langkat

c. Fasilitas Infrastruktur

Dalam upaya membangun dan memelihara infrastruktur untuk meningkatkan sistem kehidupan ekonomi dan sistem sosial masyarakat maka pemerintah Kabupaten Langkat selalu meningkatkan berbagai upaya dalam pengadaan fasilitas sarana infrastruktur yang ada seperti jembatan, jalan umum dan infrastruktur lainnya

Tabel 4.4 Prasarana Jalan Kabupaten Langkat**Berdasarkan Kondisi (km)**

Tahun	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
2015	354.49	416.91	709.20	80.67	1561.27

Sumber : BPS Kabupaten Langkat

B. Gambaran Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan data Time Series atau rentang waktu mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2018. Alat pengolah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (software) computer SPSS 16 dengan metode Path Analysis (Analisis Jalur). Oleh sebab itu, perlu dilihat bagaimana gambaran perkembangan secara umum dari analisis belanja daerah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia dan penyerapan tenaga kerja yang terjadi di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun. Dengan adanya penelitian ini semoga menjadi tambahan wawasan bagi penulis dan pembaca, dan di harapkan juga dapat di lihat pemerintah Kabupaten Langkat sebagai pertimbangan dalam menyusun anggaran dan anggaran dapat tepat sasaran sesuai bidang yang membutuhkan. Tujuan dari itu semua sehingga menjadikan Kabupaten Langkat menjadi Kabupaten yang lebih maju dari Kabupaten/Kota yang lain, semua

itu tidak menutup kemungkinan mengingat kekayaan Kabupaten Langkat yang berlimpah, mulai dari bidang pertanian, tambang, peternakan, perkebunan, dsb.

1. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan pembelanjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah harus fokus dengan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan publik. Kabupaten Langkat memiliki pengeluaran pemerintah daerah yang sangat besar jumlahnya. Pengeluaran pemerintah tersebut berupa belanja langsung dan belanja tidak langsung. Adapun total pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Langkat mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4.5 Total Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Langkat
Tahun 2012-2018 (Dalam Rupiah)**

No	Tahun Anggaran	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2012	1.394.651.166.644,00	1.378.567.032.459,08
2	2013	1.693.771.146.367,00	1.536.811.928.028,03
3	2014	1.780.922.935.500,58	1.605.301.211.464,57
4	2015	2.235.923.112.042,22	1.934.943.728.402,10
5	2016	2.548.491.552.657,00	2.287.199.857.314,68
6	2017	2.486.224.584.097,99	2.320.218.854.855,16
7	2018	2.391.115.544.062,92	2.224.110.114.424,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Langkat

a. Belanja Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan

Belanja daerah sektor pendidikan merupakan bagian dari belanja daerah dengan tujuan untuk meningkatkan *Output* dari bidang pendidikan. Tingginya anggaran sektor pendidikan serta pengelolaan yang tepat sasaran dan efektif maka realisasi belanja daerah bidang pendidikan tentunya akan meningkat dengan baik dan bahkan terasa kepada tingkat pendidikan masyarakat. Belanja sektor pendidikan diukur dengan menggunakan realisasi APBD menurut bidang pendidikan dalam satuan rupiah. Adapun total realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Langkat sektor pendidikan dari tahun 2012 sampai tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 4.6 Total Realisasi Belanja Daerah Sektor Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun 2012-2018 (Dalam Rupiah)

Tahun	Sektor Pendidikan (Rp)
2012	604.396.368.286,00
2013	694.837.871.435,00
2014	762.823.561.475,00
2015	831.668.697.178,00
2016	776.365.259.297,00
2017	817.017.087.556,00
2018	790.280.422.538,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Langkat

b. Belanja Pemerintah Daerah Sektor Kesehatan

Belanja daerah sektor kesehatan merupakan bagian dari belanja daerah dengan tujuan untuk meningkatkan *Output* dari bidang kesehatan. Tingginya anggaran sektor kesehatan serta pengelolaan yang tepat sasaran dan efektif maka realisasi belanja daerah bidang kesehatan tentunya akan meningkat dengan baik pula dan bahkan terasa kepada tingkat kesehatan kepada masyarakat. Belanja sektor kesehatan diukur dengan menggunakan realisasi APBD menurut bidang kesehatan dalam satuan rupiah. Adapun total realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Langkat sektor kesehatan dari tahun 2012 sampai tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4.7 Total Realisasi Belanja Daerah Sektor Kesehatan
Kabupaten Langkat Tahun 2012-2018 (Dalam Rupiah)**

Tahun	Sektor Kesehatan
2012	87.305.842.512,00
2013	146.553.563.434,00
2014	158.043.019.893,00
2015	199.839.352.645,00
2016	261.358.191.444,38
2017	264.003.642.780,00
2018	288.103.396.636,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Langkat

c. Belanja Daerah Pemerintah Sektor Infrastruktur

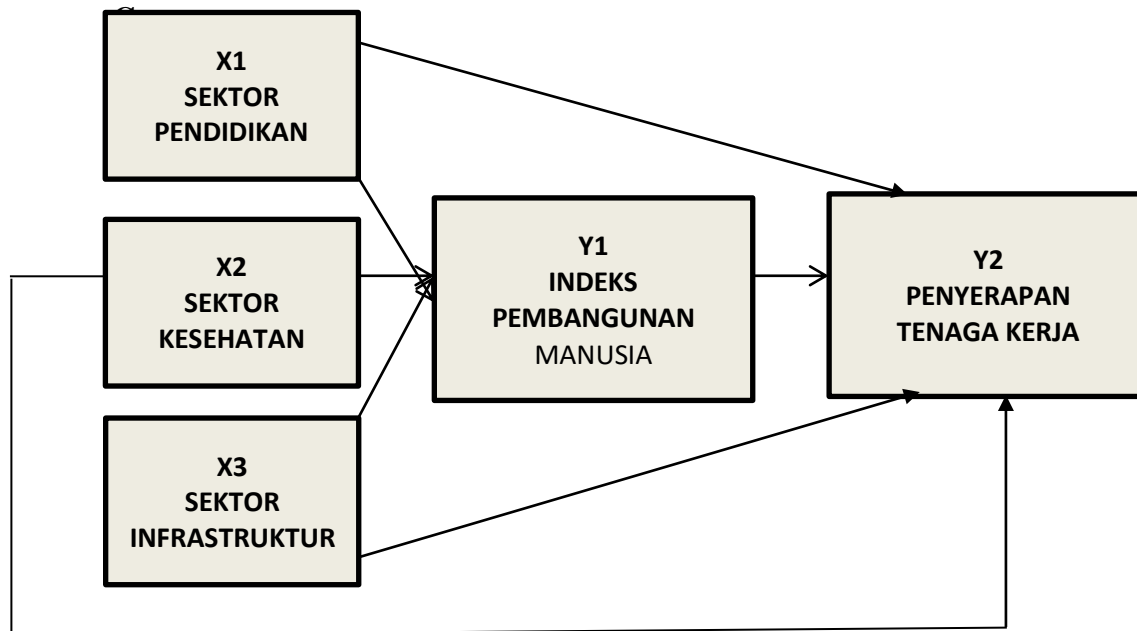
Belanja daerah sektor infrastruktur merupakan bagian dari belanja daerah dengan tujuan untuk meningkatkan *Output* dari bidang infrastruktur. Tingginya anggaran sektor infrastruktur serta pengelolaan yang tepat sasaran dan efektif maka realisasi belanja daerah bidang infrastruktur tentunya akan meningkat dengan baik dan bahkan terasa manfaatnya kepada masyarakat agar laju perekonomian masyarakat akan lebih lancar. Belanja sektor infrastruktur diukur dengan menggunakan realisasi APBD menurut bidang infrastruktur dalam satuan rupiah. Adapun total realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Langkat sektor infrastruktur dari tahun 2012 sampai tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4.8 Total Realisasi Belanja Daerah Sektor Infrastruktur
Kabupaten Langkat Tahun 2012-2018 (Dalam Rupiah)**

Tahun	Sektor Infrastruktur
2012	255.052.590.450,88
2013	308.212.154.953,43
2014	329.542.794.731,88
2015	497.257.525.402,10
2016	626.295.461.426,86
2017	527.164.701.722,16
2018	380.576.043.929,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Langkat

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Gambar 4.1. Kerangka Konseptual

Diagram jalur di atas terdiri dari tiga persamaan struktural, dimana X_1 , X_2 , dan X_3 adalah variabel eksogen dan Y_1 serta Y_2 adalah variabel endogen. Persamaan strukturalnya dapat dilihat sebagai berikut :

$$\text{Persamaan 1} \quad Y_1 = PY_{1X1} + PY_{1X2} + PY_{1X3} + e$$

$$\text{Persamaan 2} \quad Y_2 = PY_{2X1} + PY_{2X2} + PY_{2X3} + e$$

$$\text{Persamaan 3} \quad Y_2 = PY_{2X1} + PY_{2X2} + PY_{2X3} + PY_{2Y1} + e$$

Keterangan :

Y_1 = Indeks Pembangunan Manusia

Y_2 = Penyerapan Tenaga Kerja

X_1 = Sektor Pendidikan

X_2 = Sektor Kesehatan

X_3 = Sektor Infrastruktur

ϵ = *Error Term* / Tingkat Kesalahan

Hasil Persamaan $Y_1 = PY_1X_1 + PY_1X_2 + PY_1X_3 + e$

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.995 ^a	.989	.978	.21384

a. Predictors: (Constant), INFRASTRUKTUR, PENDIDIKAN, KESEHATAN

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.474	3	4.158	90.928	.002 ^a
	Residual	.137	3	.046		
	Total	12.611	6			

a. Predictors: (Constant), INFRASTRUKTUR, PENDIDIKAN, KESEHATAN

b. Dependent Variable: IPM

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	62.237	1.118		55.677	.000
	PENDIDIKAN	.005	.002	.254	2.392	.097
	KESEHATAN	.018	.002	.937	8.590	.003
	INFRASTRUKTUR	-.002	.001	-.218	-2.309	.104

a. Dependent Variable: IPM

		PENDIDIKAN	KESEHATAN	INFRASTRUKTUR
PENDIDIKAN	Pearson Correlation	1	.801 [*]	.722
	Sig. (2-tailed)		.031	.067
	N	7	7	7
KESEHATAN	Pearson Correlation	.801 [*]	1	.740
	Sig. (2-tailed)	.031		.057
	N	7	7	7
INFRASTRUKTUR	Pearson Correlation	.722	.740	1
	Sig. (2-tailed)	.067	.057	
	N	7	7	7

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

1. Interpretasi Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Analisis Regresi

Pada bagian ini analisis dibagi menjadi dua. Pertama, melihat pengaruh secara gabungan dan kedua, melihat pengaruh secara parsial.

a. Melihat pengaruh pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara gabungan terhadap indeks pembangunan manusia

Untuk melihat pengaruh variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara gabungan terhadap indeks pembangunan manusia, kita akan melihat hasil perhitungan dalam model *summary*, khususnya angka R square

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.995 ^a	.989	.978	.21384

a. Predictors: (Constant), INFRASTRUKTUR, PENDIDIKAN, KESEHATAN

Besarnya angka R square (r^2) adalah 0,989. Angka tersebut digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia dengan cara menghitung determinasi (KD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,989 \times 100\%$$

$$KD = 98,9 \%$$

Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia secara gabungan adalah 98,9 %, sedangkan sisanya sebesar 1,1% (100%- 98,9%) dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan kata lain, indeks pembangunan manusia yang dapat diterangkan dengan menggunakan variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebesar 98,9%, sementara pengaruh sebesar 1,1% disebabkan oleh variabel-variabel lain diluar model ini.

Untuk mengetahui kelayakan model regresi digambarkan angka-angka dari tabel anova di bawah ini.

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.474	3	4.158	90.928	.002 ^a
	Residual	.137	3	.046		
	Total	12.611	6			

a. Predictors: (Constant), INFRASTRUKTUR, PENDIDIKAN, KESEHATAN

b. Dependent Variable: IPM

Hipotesisnya berbunyi sebagai berikut :

H_0 : Tidak ada hubungan linier antara variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia

H_a : Ada hubungan linier antara variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia

Pengujian dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dengan membandingkan besarnya angka F penelitian dengan F tabel. Cara kedua ialah dengan membandingkan angka taraf signifikansi (sig) hasil penghitungan dengan taraf signifikansi 0,05 (5%).

1). Menggunakan cara pertama atau membandingkan besarnya angka F penelitian dengan F tabel Caranya sebagai berikut :

✓ Menghitung F penelitian ,F penelitian dari SPSS didapatkan sebesar 90,28

✓ Menghitung F tabel dengan ketentuan sebagai berikut :

Taraf signifikansi 0,05 dan Derajat Kebebasan (DK) dengan ketentuan numerator : jumlah variabel – 1 atau $5 - 1 = 4$; dan denumator : jumlah kasus – 4 atau $7 - 4 = 3$. Dengan ketentuan tersebut, diperoleh angka F tabel sebesar 9,12

✓ Menentukan kriteria uji hipotesis sebagai berikut :

Jika $F_{\text{penelitian}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika $F_{\text{penelitian}} < F_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

- ✓ Mengambil keputusan

Dari hasil perhitungan didapatkan angka F penelitian sebesar 90,928

> F tabel sebesar 9,12 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

Artinya, ada hubungan linier antara variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan demikian, model regresi di atas sudah layak dan benar. Kesimpulannya ialah variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara gabungan mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Besarnya pengaruh ialah 98,9%. Besarnya pengaruh variabel lain di luar model regresi tersebut dihitung dengan rumus : $1 - r^2$ atau $1 - 0,989$ atau sebesar 1,1%.

2). Menggunakan cara kedua atau membandingkan besarnya angka taraf signifikansi (sig) penelitian dengan taraf signifikansi sebesar 0,05.

Kriterianya sebagai berikut :

Jika sig penelitian < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika sig penelitian > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Berdasarkan perhitungan signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$, H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, ada hubungan linier antara variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia

b. Melihat pengaruh variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia.

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia secara sendiri-sendiri/ parsial, digunakan Uji t.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	62.237	1.118		55.677	.000
PENDIDIKAN	.005	.002	.254	2.392	.097
KESEHATAN	.018	.002	.937	8.590	.003
INFRASTRUKTUR	-.002	.001	-.218	-2.309	.104

a. Dependent Variable: IPM

1) Hubungan antara variabel pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia

Untuk melihat apakah ada hubungan linier antara pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia, kita dapat melakukan langkah-langkah analisis sebagai berikut

✓ menentukan hipotesis

H_0 : tidak ada hubungan linier antara pendidikan dengan indeks pembangunan manusia

H_a : Adanya hubungan linier antara pendidikan dengan indeks pembangunan manusia

Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka t penelitian sebesar 2,392.

✓ Menghitung besarnya angka t tabel dengan ketentuan sebagai berikut :

Taraf signifikansi 0,05 dan Derajat Kebebasan (DK) dengan ketentuan :

$DK = n - 2$ atau $7 - 2 = 5$. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka t tabel sebesar 2,015

- ✓ Menentukan kriteria

Kriteria uji hipotesisnya sebagai berikut :

Jika t penelitian $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika t penelitian $<$ t tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak

- ✓ Membuat keputusan

Didasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka t penelitian sebesar 2,392 $>$ t tabel sebesar 2,015 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ada hubungan linier antara pendidikan dengan indeks pembangunan manusia. Besarnya pengaruh pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 0,254 atau 25,4%.

- 2) Hubungan antara variabel kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia

Untuk melihat apakah ada hubungan linier antara kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia, kita dapat melakukan langkah-langkah analisis sebagai berikut

- ✓ menentukan hipotesis

H_0 : tidak ada hubungan linier antara kesehatan dengan indeks pembangunan manusia

H_a : Adanya hubungan linier antara kesehatan dengan indeks pembangunan manusia

Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka t penelitian sebesar 8,590

✓ Menghitung besarnya angka t tabel dengan ketentuan sebagai berikut :
 Taraf signifikansi 0,05 dan Derajat Kebebasan (DK) dengan ketentuan :
 $DK = n - 2$ atau $7 - 2 = 5$. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka t tabel sebesar 2,015

✓ Menentukan kriteria

Kriteria uji hipotesisnya sebagai berikut :

Jika t penelitian $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika t penelitian $<$ t tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak

✓ Membuat keputusan

Didasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka t penelitian sebesar 8,590 $>$ t tabel sebesar 2,015 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ada hubungan linier antara kesehatan dengan indeks pembangunan manusia. Besarnya pengaruh kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 0,937 atau 93,7%.

3) Hubungan antara variabel infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia

Untuk melihat apakah ada hubungan linier antara infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia, kita dapat melakukan langkah-langkah analisis sebagai berikut

✓ menentukan hipotesis

H_0 : tidak ada hubungan linier antara infrastruktur dengan indeks pembangunan manusia

H_a : Adanya hubungan linier antara infrastruktur dengan indeks pembangunan manusia

Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka t penelitian sebesar -2,309.

✓ Menghitung besarnya angka t tabel dengan ketentuan sebagai berikut :

Taraf signifikansi 0,05 dan Derajat Kebebasan (DK) dengan ketentuan :

$DK = n - 2$ atau $7 - 2 = 5$. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka t tabel sebesar 2,015

✓ Menentukan kriteria

Kriteria uji hipotesisnya sebagai berikut :

Jika t penelitian $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika t penelitian $<$ t tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak

✓ Membuat keputusan

Didasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka t penelitian sebesar -2,309 $<$ t tabel sebesar 2,015 sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya tidak ada hubungan linier antara infrastruktur dengan indeks pembangunan manusia. Besarnya pengaruh infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia sebesar -0,218 atau 21,8% atau dianggap tidak signifikan.

Analisis Korelasi

Bagian kedua akan menganalisis korelasi antarvariabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan hasil penghitungan SPSS sebagaimana tertera di bawah ini :

		PENDIDIKAN	KESEHATAN	INFRASTRUKTUR
PENDIDIKAN	Pearson Correlation	1	.801*	.722
	Sig. (2-tailed)		.031	.067
	N	7	7	7
KESEHATAN	Pearson Correlation	.801*	1	.740
	Sig. (2-tailed)	.031		.057
	N	7	7	7
INFRASTRUKTUR	Pearson Correlation	.722	.740	1
	Sig. (2-tailed)	.067	.057	
	N	7	7	7

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

a. Korelasi antar pendidikan dan kesehatan

Berdasarkan perhitungan diperoleh angka korelasi antara variabel pendidikan dan kesehatan sebesar 0,801. Untuk menafsir angka tersebut digunakan kriteria sebagai berikut :

- 0 – 0,25 : korelasi lemah (dianggap tidak ada) sangat
- > 0,25 – 0,5 : korelasi cukup
- > 0,5 – 0,75 : korelasi kuat
- > 0,75 – 1 : korelasi sangat kuat

Korelasi sebesar 0,801 mempunyai maksud hubungan antara variabel pendidikan dan kesehatan cukup kuat dan searah (karena hasilnya positif). Searah artinya jika

pendidikan tinggi maka kesehatan juga tinggi. Korelasi dua variabel bersifat signifikan karena angka signifikansi sebesar $0,031 < 0,05$ maka hubungan kedua variabel signifikan; sebaliknya jika angka signifikansi (sig) $> 0,05$ maka hubungan kedua variabel tidak signifikan.

b. Korelasi antar pendidikan dan infrastruktur

Berdasarkan perhitungan diperoleh angka korelasi antara variabel pendidikan dan infrastruktur 0,722. Korelasi dua variabel bersifat tidak signifikan karena angka signifikansi sebesar $0,067 > 0,05$.

c. Korelasi antar kesehatan dan infrastruktur

Berdasarkan perhitungan diperoleh angka korelasi antara variabel kesehatan dan infrastruktur 0,740. Korelasi sebesar 0,740 mempunyai maksud hubungan antara variabel kesehatan dan infrastruktur kuat dan searah (karena hasilnya positif). Korelasi dua variabel bersifat tidak signifikan karena angka signifikansi sebesar $0,057 > 0,05$.

Hasil Persamaan $Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.886 ^a	.785	.569	.57477

a. Predictors: (Constant), INFRASTRUKTUR, PENDIDIKAN, KESEHATAN

2. Interpretasi Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

a. Melihat pengaruh pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara gabungan terhadap penyerapan tenaga kerja. Besarnya angka R square (r^2) adalah 0,785. Angka tersebut digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap penyerapan tenaga kerja dengan cara menghitung determinasi (KD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,785 \times 100\%$$

$$KD = 78,5 \%$$

bahwa pengaruh pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap penyerapan tenaga kerja secara gabungan adalah 78,5 %, sedangkan sisanya sebesar 21,5% (100%-78,5%) dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan kata lain, penyerapan tenaga kerja yang dapat diterangkan dengan menggunakan variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebesar 78,5%, sementara pengaruh sebesar 21,5% disebabkan oleh variabel-variabel lain diluar model ini.

Untuk mengetahui kelayakan model regresi digambarkan angka-angka dari tabel anova di bawah ini.

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.612	3	1.204	3.645	.158 ^a
	Residual	.991	3	.330		
	Total	4.603	6			

a. Predictors: (Constant), INFRASTRUKTUR, PENDIDIKAN, KESEHATAN

b. Dependent Variable: PENYERAPAN TENAGA KERJA

Hipotesisnya berbunyi sebagai berikut :

H_0 : Tidak ada hubungan linier antara variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap penyerapan tenaga kerja

H_a : Ada hubungan linier antara variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap penyerapan tenaga kerja

Pengujian dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dengan membandingkan besarnya angka F penelitian dengan F tabel, dan cara kedua ialah dengan membandingkan angka taraf signifikansi (sig) hasil penghitungan dengan taraf signifikansi 0,05 (5%).

1). Menggunakan cara pertama atau membandingkan besarnya angka F penelitian dengan F tabel Caranya sebagai berikut :

- ✓ Menghitung F penelitian ,F penelitian dari SPSS didapatkan sebesar 3,645
- ✓ Menghitung F tabel dengan ketentuan sebagai berikut :

Taraf signifikansi 0,05 dan Derajat Kebebasan (DK) dengan ketentuan numerator : jumlah variabel – 1 atau $5 - 1 = 4$; dan denumator : jumlah kasus – 4 atau $7 - 4 = 3$.

Dengan ketentuan tersebut, diperoleh angka F tabel sebesar 9,12

- ✓ Menentukan kriteria uji hipotesis sebagai berikut :

Jika F penelitian > F tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika F penelitian $< F$ tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

✓ Mengambil keputusan

Dari hasil perhitungan didapatkan angka F penelitian sebesar $3,645 < F$ tabel sebesar $9,12$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak.

Artinya, tidak ada hubungan linier antara variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap penyerapan tenaga kerja.. Kesimpulannya ialah variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara gabungan tidak mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

2).cara kedua ialah dengan membandingkan angka taraf signifikansi (sig) hasil penghitungan dengan taraf signifikansi $0,05$ (5%).

Kriterianya sebagai berikut :

Jika sig penelitian $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika sig penelitian $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Berdasarkan perhitungan signifikansi sebesar $0,158 > 0,05$, H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, secara simultan tidak ada hubungan linier antara variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap penyerapan tenaga kerja

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap penyerapan tenaga kerja secara sendiri-sendiri/ parsial, digunakan Uji t .

Dari ketentuan diperoleh angka t tabel sebesar $2,015$

✓ Menentukan kriteria

Kriteria uji hipotesisnya sebagai berikut :

Jika t penelitian $> t$ tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika t penelitian $< t$ tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak

- ✓ Membuat keputusan

Didasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka t penelitian:

Pendidikan $1,145 < t$ tabel sebesar 2,015

Kesehatan $1,259 < t$ tabel sebesar 2,015

Infrastruktur $-2,95 < t$ tabel sebesar 2,015

Dari ketiga variabel dapat di simpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya tidak ada hubungan linier antara pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dengan penyerapan tenaga kerja.

Persamaan 3 $Y_2 = PY_2X_1 + PY_2X_2 + PY_2X_3 + PY_2Y_1 + e$

Persamaan X1 → Y1

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.847 ^a	.717	.660	.84488

a. Predictors: (Constant), PENDIDIKAN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	56.775	3.293		17.243	.000
	PENDIDIKAN	.015	.004	.847	3.559	.016

a. Dependent Variable: IPM

Persamaan $X1Y1 \longrightarrow Y2$

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.909 ^a	.826	.740	.44696

a. Predictors: (Constant), IPM, PENDIDIKAN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-30.509	13.545		-2.252	.087
	PENDIDIKAN	.002	.004	.182	.465	.666
	IPM	.453	.237	.750	1.915	.128

a. Dependent Variable: PENYERAPAN TENAGA KERJA

3. Interpretasi Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Indeks Pembangunan Manusia.

Untuk mengetahui variabel Indeks Pembangunan Manusia mampu menjadi variabel intervening antara pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, maka harus dilakukan perhitungan antara pengaruh langsung dan tidak langsung antara pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Apabila pengaruh tidak langsung lebih besar dari pengaruh langsung maka indeks pembangunan manusia (IPM) dapat menjadi variabel intervening antara pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Untuk melakukan perhitungan secara langsung dan tidak langsung dilakukan dari nilai *standardized coefficients* regresi masing masing variabel independent terhadap variabel dependen.

Untuk mengetahui adanya pengaruh pendidikan melalui IPM terhadap penyerapan tenaga kerja digunakan analisis jalur (path analysis). Besarnya nilai eror masing masing pengaruh variabel independen terhadap dependen di dapat melalui perhitungan sebagai berikut :

$$Pe_1 = \sqrt{1 - 0,847^2} = 0,531$$

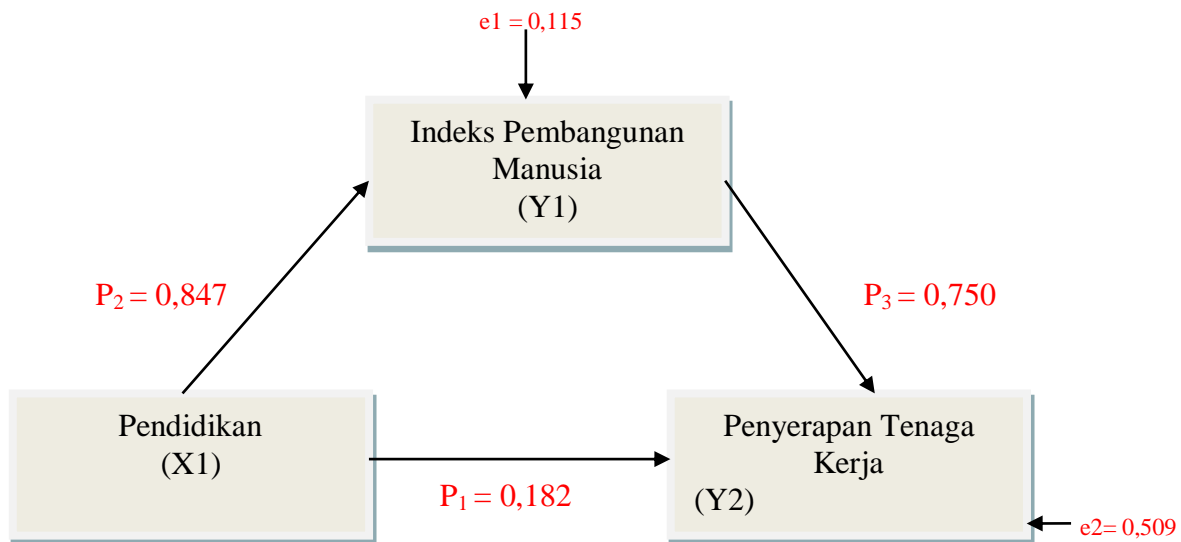
$$Pe_2 = \sqrt{1 - 0,909^2} = 0,417$$

Dalam teori trimming pengujian validitas model riset diamati melalui perhitungan koefisien determinasi total sebagai berikut :

$$\begin{aligned} R^2_m &= 1 - P^2e_1 - p^2e_2 \\ &= 1 - (0,531)^2 - (0,417)^2 \\ &= 1 - (0,281) - (0,173) \\ &= 0,95 \\ &= 95 \% \end{aligned}$$

Nilai koefisien determinasi sebesar 95% menunjukkan bahwa 95% informasi yang terkandung dalam data dapat di jelaskan oleh model, sedangkan sisanya sebesar 5% dijelaskan oleh error dan variabel lain di luar model. Angka ini relatif besar sehingga **layak untuk dilakukan interpretasi** lebih lanjut.

Dilihat dari hasil output spss memberikan nilai standardized beta untuk pendidikan sebesar 0,847 dan signifikan pada 0,016 yang berarti pendidikan mempengaruhi IPM . Nilai koefisien standardized beta 0,847 merupakan nilai path atau jalur P₂. Nilai koefisien standardized beta 0,182 merupakan nilai path atau jalur P₁. Nilai koefisien standardized beta 0,750 merupakan nilai path atau jalur P₃. Besarnya nilai e₁ = (1 – 0,660)² = 0,115, dan besarnya nilai e₂ = (1 – 0,740)² = 0,509



Gambar 4.2. Analisis Jalur Pengaruh Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Melalui IPM

Hasil analisis jalur di atas menunjukkan bahwa Sektor Pendidikan dapat berpengaruh langsung terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari pengaruh Sektor Pendidikan ke Indeks Pembangunan Manusia (sebagai variabel intervening) lalu ke Penyerapan Tenaga Kerja.

- ✓ Besarnya Pengaruh **langsung** Sektor Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (P_1) = 0,182
- ✓ Besarnya pengaruh **tidak langsung** Sektor Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui Indeks Pembangunan Manusia yaitu ($P_2 \times P_3$) ($0,847 \times 0,750$) = 0,635
- ✓ Besarnya pengaruh **total sebagai pengaruh mediasi** Sektor Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui Indeks Pembangunan Manusia (pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung) = $0,182 + (0,847 \times 0,750) = 0,817$

Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan :

Nilai pengaruh langsung (P1) = 0,182 lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung (P2 x P3) = 0,635, maka H_a diterima, artinya Sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui Indeks pembangunan Manusia sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia menjadi variabel yang memediasi/intervening antara Sektor Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, maka Indeks Pembangunan Manusia berfungsi sebagai variabel intervening.

Persamaan $X_2 \longrightarrow Y_1$

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.979 ^a	.959	.951	.32238

a. Predictors: (Constant), KESEHATAN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	64.592	.377		171.407	.000
	KESEHATAN	.019	.002	.979	10.786	.000

a. Dependent Variable: IPM

Persamaan $X_2Y_1 \longrightarrow Y_2$

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.950 ^a	.903	.854	.33494

a. Predictors: (Constant), IPM, KESEHATAN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-90.264	30.014		-3.007	.040
	KESEHATAN	-.017	.009	-1.440	-1.873	.134
	IPM	1.398	.465	2.314	3.009	.040

a. Dependent Variable: PENYERAPAN TENAGA KERJA

4. Interpretasi Kesehatan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Indeks Pembangunan Manusia.

Besarnya nilai error masing masing pengaruh variabel independen terhadap dependen di dapat melalui perhitungan sebagai berikut :

$$Pe_1 = \sqrt{1 - 0,979^2} = 0,203$$

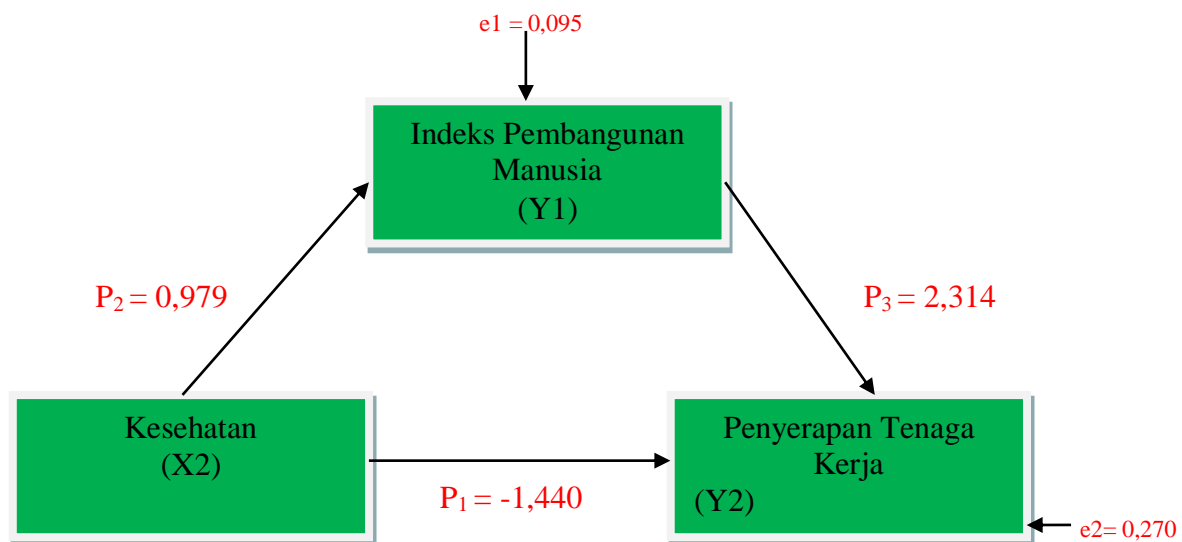
$$Pe_2 = \sqrt{1 - 950^2} = 0,312$$

Dalam teori trimming pengujian validitas model riset diamati melalui perhitungan koefisien determinasi total sebagai berikut :

$$\begin{aligned} R^2_m &= 1 - P^2e_1 - p^2e_2 \\ &= 1 - (0,203)^2 - (0,312)^2 \\ &= 1 - (0,041) - (0,097) \\ &= 0,997 \\ &= 99 \% \end{aligned}$$

Nilai koefisien determinasi sebesar 99% menunjukkan bahwa 99% informasi yang terkandung dalam data dapat di jelaskan oleh model, sedangkan sisanya sebesar 1% dijelaskan oleh error dan variabel lain di luar model. Angka ini relatif besar sehingga **layak untuk dilakukan interpretasi** lebih lanjut.

Dilihat dari hasil output spss memberikan nilai standardized beta untuk kesehatan sebesar 0,979 dan signifikan pada 0,000 yang berarti kesehatan mempengaruhi IPM . Nilai koefisien standardized beta 0,979 merupakan nilai path atau jalur P_2 . Nilai koefisien standardized beta -1,440 merupakan nilai path atau jalur P_1 . Nilai koefisien standardized beta 2,314 merupakan nilai path atau jalur P_3 . Besarnya nilai $e_1 = (1 - 0,951)^2 = 0,095$, dan besarnya nilai $e_2 = (1 - 0,854)^2 = 0,270$



Gambar 4.3. Analisis Jalur Pengaruh Kesehatan Terhadap Penyerapan Tenaga Melalui IPM

Hasil analisis jalur di atas menunjukkan bahwa Sektor kesehatan dapat berpengaruh langsung terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan dapat juga berpengaruh tidak

langsung yaitu dari pengaruh Sektor kesehatan ke Indeks Pembangunan Manusia (sebagai variabel intervening) lalu ke Penyerapan Tenaga Kerja.

- ✓ Besarnya Pengaruh **langsung** Sektor kesehatan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (P1) = -1,440
- ✓ Besarnya pengaruh **tidak langsung** Sektor kesehatan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui Indeks Pembangunan Manusia yaitu (P2 x P3) (0,979 x 2,314) = 2,265
- ✓ Besarnya pengaruh **total sebagai pengaruh mediasi** Sektor kesehatan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui Indeks Pembangunan Manusia (pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung) = -1,440 + (0,979 x 0,2314) = 0,825

Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan :

Nilai pengaruh langsung (P1) = -1,440 lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung (P2 x P3) = 2,265, maka H_0 diterima, artinya Sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui Indeks pembangunan Manusia sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia menjadi variabel yang memediasi/intervening antara Sektor kesehatan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, maka **Indeks Pembangunan Manusia berfungsi sebagai variabel intervening.**

Persamaan X3 → Y1**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.658 ^a	.433	.320	1.19538

a. Predictors: (Constant), INFRASTRUKTUR

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	65.486	1.576		41.559	.000
	INFRASTRUKTUR	.007	.004	.658	1.956	.108

a. Dependent Variable: IPM

Persamaan X3Y1 → Y2**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.906 ^a	.821	.732	.45382

a. Predictors: (Constant), IPM, INFRASTRUKTUR

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-37.426	11.135		-3.361	.028
	INFRASTRUKTUR	-.001	.002	-.084	-.299	.780
	IPM	.580	.170	.959	3.413	.027

a. Dependent Variable: PENYERAPAN TENAGA KERJA

5. Interpretasi Infrastruktur Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Indeks Pembangunan Manusia.

Besarnya nilai error masing masing pengaruh variabel independen terhadap dependen di dapat melalui perhitungan sebagai berikut :

$$Pe_1 = \sqrt{1 - 0,658^2} = 0,753$$

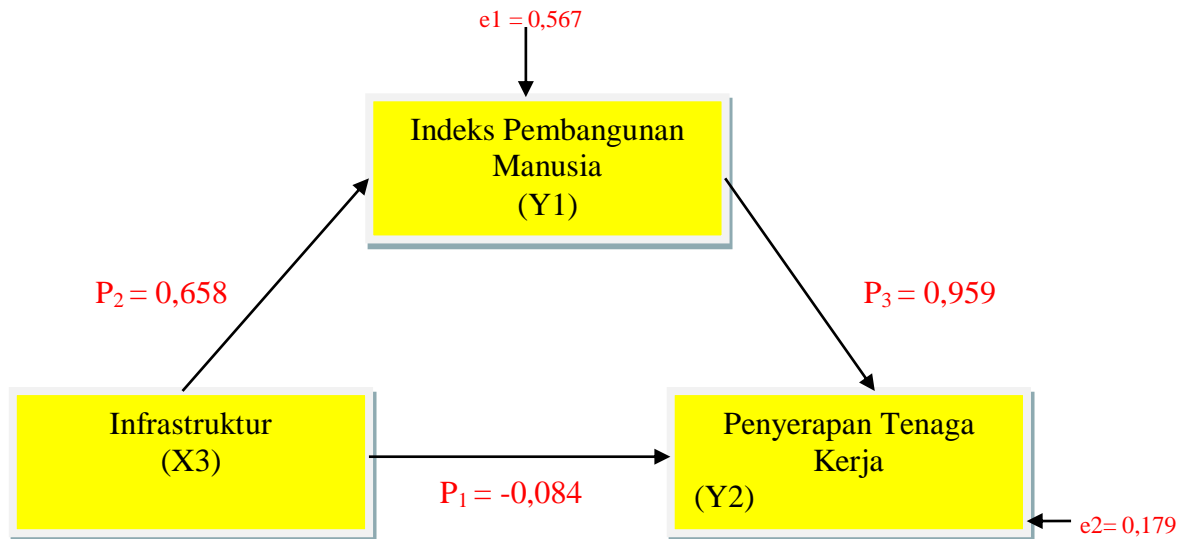
$$Pe_2 = \sqrt{1 - 0,906^2} = 0,423$$

Dalam teori trimming pengujian validitas model riset diamati melalui perhitungan koefisien determinasi total sebagai berikut :

$$\begin{aligned} R^2m &= 1 - P^2e_1 \cdot p^2e_2 \\ &= 1 - (0,753)^2 (0,423)^2 \\ &= 1 - (0,567) (0,178) \\ &= 0,9 \\ &= 9 \% \end{aligned}$$

Nilai koefisien determinasi sebesar 9% menunjukkan bahwa hanya 9% informasi dalam data yang dapat di jelaskan oleh model, sedangkan selebihnya sebesar 91% dijelaskan variabel lain di luar model. Dilihat dari hasil output spss memberikan nilai standardized beta untuk infrastruktur sebesar 0,658 dan signifikan pada 0,108 yang berarti data tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05 ($> 0,05$) .Dalam hal ini menunjukkan bahwa hubungan secara parsial infrastruktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia,dan **tidak layak dilakukan interpretasi lebih lanjut.**

Nilai koefisien standardized beta 0,979 merupakan nilai path atau jalur P_2 . Nilai koefisien standardized beta -1,440 merupakan nilai path atau jalur P_1 . Nilai koefisien standardized beta 2,314 merupakan nilai path atau jalur P_3 . Besarnya nilai $e_1 = (1 - 0,658)^2 = 0,567$, dan besarnya nilai $e_2 = (1 - 0,906)^2 = 0,179$



Gambar 4.4. Analisis Jalur Pengaruh Infrastruktur Terhadap Penyerapan Tenaga Melalui IPM

D. PEMBAHASAN

1. Belanja daerah sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Indeks pembangunan Manusia di Kabupaten Langkat.

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (“a process of enlarging people’s choices”). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP (Human Development Report, 1995:103)

Dari hasil penelitian di dapat besarnya angka R square (r^2) adalah 0,989. Angka tersebut digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia dengan cara menghitung determinasi (KD) .Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia secara gabungan adalah 98,9 %, sedangkan sisanya sebesar 1,1% (100%- 98,9%) dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan kata lain, indeks pembangunan manusia yang dapat diterangkan dengan menggunakan variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebesar 98,9%, sementara pengaruh sebesar 1,1% disebabkan oleh variabel-variabel lain diluar model ini .

Untuk menengetahui adanya hubungan antara pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap IPM, maka dilakukanlah pengujian dengan dua cara, pertama dengan membandingkan besarnya angka F penelitian dengan F tabel. Dari hasil perhitungan didapatkan angka F penelitian sebesar $90,928 > F$ tabel sebesar 9,12 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

Cara kedua ialah dengan membandingkan angka taraf signifikansi (sig) hasil penghitungan dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Berdasarkan perhitungan signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$, H_0 ditolak dan H_a diterima.

Artinya, ada hubungan linier antara variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan demikian, model regresi di atas sudah layak dan benar. setelah di lakukan penelitian lebih lanjut, maka muncul lah kesimpulan, yaitu :

Kesimpulan (1) variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara gabungan (simultan) mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Besarnya pengaruh ialah 98,9%. Besarnya pengaruh variabel lain di luar model regresi tersebut dihitung dengan rumus : $1 - r^2$ atau $1 - 0,989$ atau sebesar 1,1%..

Kesimpulan (2) secara masing-masing (parsial), variabel pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, namun variabel infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

2. Belanja daerah sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Langkat.

Penyerapan Tenaga Kerja adalah jumlah tertentu dari tenaga kerja yang dipakai atau yang mampu di serap dalam suatu unit usaha tertentu juga. Penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh jumlah tenaga kerja yang akan diserap dalam usaha tertentu. Maka dari itu, kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja akan berbeda dalam satu unit usaha dengan usaha yang lainnya karena kemampuan usaha unit yang selalu berbeda-beda (Indayati, 2010).

Dari hipotesis diatas bertujuan untuk mengetahui pendidikan kesehatan dan infrastruktur apakah memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Maka untuk mengetahuinya dilakukan lah dua pengujian untuk menguji model regresi tersebut. Cara pertama, dari hasil perhitungan didapatkan angka F penelitian sebesar $3,645 < F$ tabel sebesar 9,12 sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Cara kedua, berdasarkan perhitungan signifikansi sebesar $0,158 > 0,05$, H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, *tidak ada hubungan linier antara variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap penyerapan tenaga kerja. Kesimpulannya ialah, variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara gabungan (simultan), maupun secara masing-masing (parsial) tidak mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.*

3. Belanja daerah sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Langkat

Analisis jalur (Path Analysis). Secara sederhana di artikan bahwa analisis jalur bertujuan untuk memediasi antara pengaruh yang sebelumnya secara langsung menjadi tidak langsung. Artinya dengan adanya mediasi maka diharapkan variabel yang sebelumnya di teliti secara langsung tidak signifikan menjadi signifikan dan menjadi berfungsi atau berpengaruh. Dan dalam hal ini tidak menutup kemungkinan juga, bahwa variabel intervening yang kita gunakan berfungsi dalam penelitian. Hal ini di karenakan pengaruh langsung yang lebih besar dari pada pengaruh tidak langsung. Setelah dilakukan penelitian secara parsial, maka di peroleh lah hasil sebagai berikut :

Sektor Pendidikan

Nilai pengaruh langsung ($P1$) = 0,182 lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung ($P2 \times P3$) = 0,635, maka H_a diterima, artinya Sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui Indeks pembangunan Manusia sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa *Indeks Pembangunan Manusia menjadi variabel yang memediasi/intervening antara Sektor Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, maka Indeks Pembangunan Manusia berfungsi sebagai variabel intervening.*

Sektor Kesehatan

Nilai pengaruh langsung (P1) = -1,440 lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung (P2 x P3) = 2,265, maka H_0 diterima, artinya Sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui Indeks pembangunan Manusia sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa *Indeks Pembangunan Manusia menjadi variabel yang memediasi/intervening antara Sektor kesehatan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, maka Indeks Pembangunan Manusia berfungsi sebagai variabel intervening.*

Sektor Infrastruktur

Nilai koefisien determinasi sebesar 9% menunjukkan bahwa hanya 9% informasi dalam data yang dapat di jelaskan oleh model, sedangkan selebihnya sebesar 91% dijelaskan variabel lain di luar model. Dilihat dari hasil output spss memberikan nilai standardized beta untuk infrastruktur sebesar 0,658 dan signifikan pada 0,108 yang berarti data tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05 ($> 0,05$) .Dalam hal ini menunjukkan bahwa hubungan secara parsial infrastruktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia,dan **tidak layak dilakukan interpretasi lebih lanjut.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Langkat yang merupakan salah satu wilayah yang cukup potensial memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Potensi inilah yang akan dikembangkan dengan baik dari segi modal maupun ketenagakerjaan. Kabupaten Langkat juga merupakan pusatnya tambang terutama Galian C, dan hasil tambang tersebut merupakan untuk bahan-bahan konstruksi untuk kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi dan kota-kota lain di Sumatera utara. Maka seharusnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat cukup tinggi, mengingat sektor industri tambang yang ada di Langkat. Langkat menjadi salah satu lahan Industri yang khususnya bergerak di bidang Galian-C. Maka di harapkan dari satu sektor ini saja pun mampu menampung atau menyerap tenaga kerja. Namun dalam hal ini juga perlu kita teliti faktor-faktor lain yang menjadi penyebab penyerapan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Langkat.

Penyerapan tenaga kerja yang dilakukan merupakan jumlah tenaga kerja yang diserap dalam usaha tertentu. Namun kemampuan penyerapan akan berbeda satu unit usaha dengan usaha lainnya karena kemampuan unit usaha yang berbeda-beda. Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi negatif apabila kenaikan upah minimum sangat besar tanpa mempertimbangkan modal dan dua pengeluaran agregat. Penyerapan tenaga kerja yang dipertimbangkan dalam fungsi produksi adalah substitusi. Perusahaan memilih untuk tidak menentukan upah minimum sehingga mempekerjakan tenaga kerja dengan menegosiasi ulang upah yang lebih rendah dengan sifat penyerapan tenaga kerja adalah pengganti

tenaga kerja lain, pemanfaatan pengangguran, dan tenaga kerja hanya bersifat kontrak yang sudah pada jatuh tempo nya maka akan otomatis berhenti atau di sambung kembali. Indonesia berupaya untuk melakukan penyerapan tenaga kerja dalam rangka pengurangan pengangguran.

Tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi yang memegang peranan suatu kegiatan ekonomi. Tinggi rendahnya kualitas tenaga kerja akan mempengaruhi kualitas perekonomian suatu negara atau daerah, khususnya produktivitas dari output yang dihasilkannya. Produktivitas suatu daerah bisa di lihat dari keadaan nilai produksi daerah yang tercermin dalam nilai PDRB dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja sesuai dengan lapangan usaha yang ada di daerah yang bersangkutan. Persoalan pokok ketenagakerjaan bersumber dari kurangnya daya saing tenaga kerja terhadap laju pertumbuhan tenaga kerja. Persoalan ini sesungguhnya tidaklah berdiri sendiri tetapi merupakan mata rantai yang saling terkait dalam proses pembangunan nasional secara keseluruhan. Jika hendak mengusutnya maka pada awalnya pertumbuhan penduduk, menyusul masalah pendidikan, selanjutnya masalah pertumbuhan ekonomi dan akhirnya berdampak pada pertumbuhan kesempatan kerja dan angkatan kerja.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari IPM. Indeks Pembangunan Manusia dapat mengukur perkembangan manusia secara terukur dan representatif. IPM dapat juga di artikan bagaimana masyarakat atau penduduk dapat mengakses

pembangunan dalam menerima pendapatan, kesehatan, pendidikan, jalan infrastruktur dan sebagainya.

Indeks Pembangunan Manusia dapat diukur dengan tiga dimensi yaitu berumur panjang, kesehatan, dan penghasilan individu untuk mendukung hidup layak dan juga diarahkan oleh harapan hidup ketika lahir, maka dirumuskan menjadi Indeks Angka Harapan Hidup, tolak ukur ilmu pengetahuan yaitu dengan tingkat baca tulis dan rata-rata lama sekolah membentuk Indeks Pendidikan dan standar hidup layak ditunjukkan oleh pengeluaran riil perkapita yang dibakukan dalam Indeks Pendapatan.

Dalam persoalan-persoalan mengenai tingkat pembangunan manusia telah menjadi perhatian khusus kepada pemerintahan setempat. Berbagai isu dalam ukuran pembangunan manusia dibuat namun nyatanya tidak semuanya dapat dipergunakan sebagai ukuran standar yang bisa dibandingkan antar daerah atau wilayah. Dari masa ke masa perhatian pemerintah terhadap penyajian pembangunan sumber daya manusia atau Indeks Pembangunan Manusia seringkali muncul polemik dan kegaduan, namun semua pihak sepakat bahwa pembangunan sumber daya manusia sangat penting dan suatu keberhasilan pembangunan suatu daerah/wilayah pada berbagai bidang yang terutama bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian Indeks Pembangunan Manusia menjadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi, sosial dan di bidang lain-lainnya. Peningkatan suatu kualitas SDM perlu adanya upaya sistematis sehingga terintegrasi dalam semua aspek kehidupan seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, politik, budaya dan kehidupan sosial lainnya.

Meningkatnya nilai IPM menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sumber daya manusia yang sangat berkualitas pada suatu daerah. Sumber daya manusia menjadi subjek dan objek pembangunan, hal ini menjadikan bahwa manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dengan demikian, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan unsur pembangunan yang sangat penting sekali. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana, oleh karena itu dibutuhkan suatu kebijakan yang sangat menjanjikan yaitu berinvestasi.

Investasi pada manusia ini untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, seperti investasi di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Aspek pendidikan, kesehatan dan infrastruktur merupakan tujuan pembangunan yang sangat mendasar di suatu daerah atau di wilayah. Untuk mendukung aspek pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tidak lepas dari membutuhkan anggaran. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah dibutuhkan dalam menjalankan aspek pendidikan, kesehatan dan infrastruktur melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah salah satu cara untuk membangun suatu daerah atau wilayah. Pengeluaran pemerintah digunakan sebagai untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting diantaranya sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

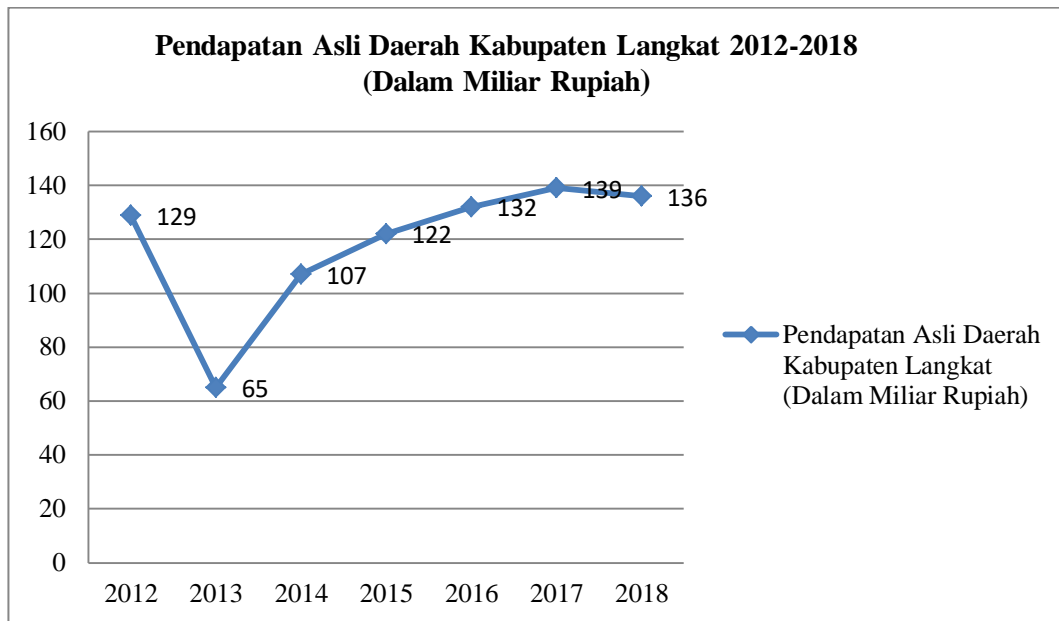
Dengan perkembangan pembangunan Kabupaten Langkat yang sangat pesat dan maju akan menyebabkan semakin berkembang pada laju perekonomian di segala bidang. Untuk dapat melihat laju pertumbuhan Kabupaten Langkat dapat kita lihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat dari tahun 2012 hingga tahun 2018.

**Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2012-2018 (Dalam Rupiah)**

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat
1	2012	129.242.580.780,08
2	2013	65.521.499.189,41
3	2014	107.811.975.547,21
4	2015	122.715.359.909,79
5	2016	132.673.213.412,93
6	2017	139.717.647.855,09
7	2018	136.680.578.541,45

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Langkat

Dapat kita lihat pada Tabel 1.1 bahwa PAD Kabupaten Langkat pada tahun 2013 merupakan Pendapatan Asli Daerah yang paling kecil, dimana memang anggaran yang di susun memang tergolong paling kecil yaitu sebesar 73,93 miliar. Namun dari target PAD Yang di bebaskan kepada 15 satuan kerja perangkat daerah (SKPD), hanya enam SKPD yang mampu mencapai target 100 %. Dimana SKPD yang mampu 100% hanya Dinas Peternakan, Perikanan dan kelautan, Kebersihan dan Pertamanan, Bagian umum dan Perlengkapan, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat. Dan ada 9 SKPD di Langkat dengan realisasi di bawah 100%. Seperti Dinas PU , Dispenda Langkat, Dinas Kesehatan, Kantor RSUD Tanjung Pura, Dinas Perhubungan, BPKAD, Kantor Pariwisata Seni dan Budaya , Disperindag, dan Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Langkat. Untuk lebih jelas melihat naik turunnya PAD Kabupaten Langkat, maka berdasarkan angka –angka yang ada pada tabel 1.1 maka dapat kita gambarkan ke grafik untuk memperjelas pergerakan, mengetahui naik turunnya angka PAD di Kabupaten Langkat ,dapat kita lihat pada Gambar 1.1 berikut ini:



Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Langkat

Gambar 1.1 Grafik Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat

Berdasarkan kepada angka-angka dalam tabel 1.1 dalam gambar 1.1 di tunjukan grafik perkembangan PAD Kabupaten Langkat di tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup drastis, jika di bandingkan dengan PAD pada tahun lainnya. Hal ini seperti yang di jelaskan diatas bahwa maka peningkatan PAD Kabupaten Langkat dalam kurun waktu 7 tahun mengalami peningkatan sebesar 7.437.997.761,37.

Peningkatan tersebut tergolong kecil untuk kurun waktu 7 tahun, hal ini lah yang menjadi pertanyaan mengapa PAD Kabupaten Langkat bergerak lambat, apakah ada faktor yang menjadi penghambat dan apakah mungkin Pemerintah Kabupaten Langkat kurang pandai memanfaatkan PAD tersebut untuk mencapai yang lebih optimal. Dengan adanya PAD tersebut pemerintah Kabupaten Langkat harus optimal menggunakan hasil pendapatan daerah agar dalam pembangunan daerah yang maju dan juga berdampak kepada masyarakat supaya masyarakat penduduk sejahtera adil dan makmur. Pembangunan manusia tidak terlepas

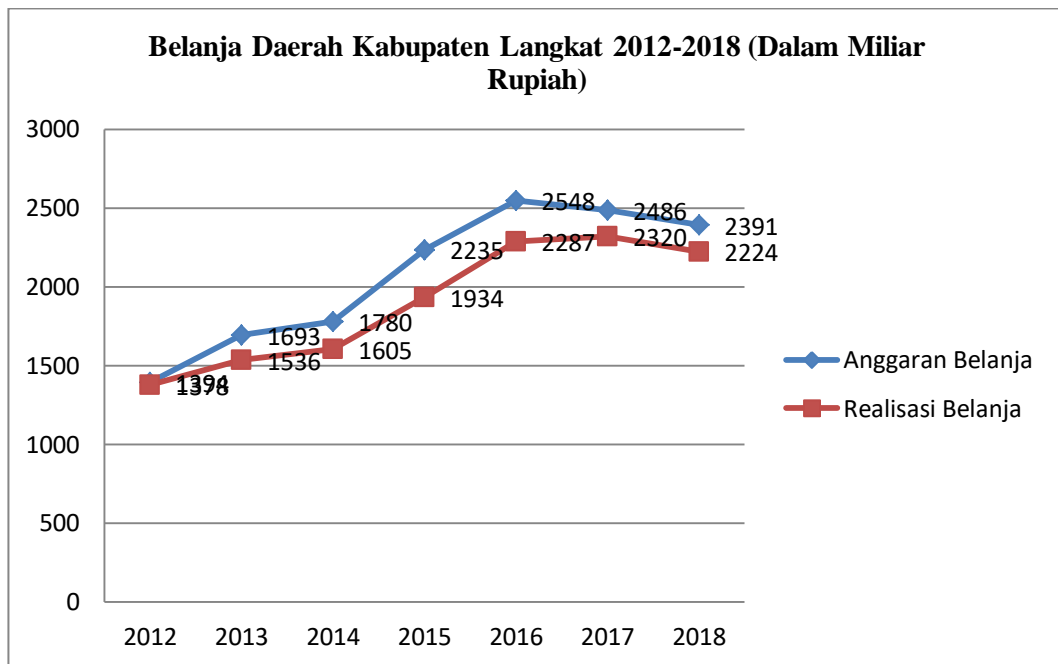
dengan dari peran pemerintah daerah dalam pembangunan, sebab manusia perlu modal utama dalam pembangunan suatu daerah. Kebijakan adanya APBD sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berlakunya desentralisasi fiskal, hal ini bertujuan supaya pemerintah daerah dapat membangun daerah yang secara optimal. Untuk mengetahui APBD Kabupaten Langkat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012-2018 (Dalam Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2012	1.394.651.166.644,00	1.378.567.032.459,08
2	2013	1.693.771.146.367,00	1.536.811.928.028,03
3	2014	1.780.922.935.500,58	1.605.301.211.464,57
4	2015	2.235.923.112.042,22	1.934.943.728.402,10
5	2016	2.548.491.552.657,00	2.287.199.857.314,68
6	2017	2.486.224.584.097,99	2.320.218.854.855,16
7	2018	2.391.115.544.062,92	2.224.110.114.424,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Langkat

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Langkat dari tahun ke tahun selalu meningkat hanya pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 dari 2.3 triliun mengalami penurunan menjadi 2.2 triliun. Dalam hal ini jika kita kaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang benar adanya bahwa pada PAD pada tahun 2017 juga mengalami penurunan yaitu dari 139 miliar Rupiah menjadi 136 miliar Rupiah. Namun hal ini belum begitu jelas apa pengaruhnya sehingga mengalami penurunan. Adanya APBD yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Langkat agar dapat digunakan untuk pembangunan yang benar-benar membangun untuk masyarakat, agar masyarakat dapat merasakan pembangunan yang ada.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Langkat

**Gambar 1.2 Grafik Belanja Daerah Kabupaten Langkat 2012-2018
(Dalam Miliar Rupiah)**

Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan pada pembangunan manusia yang baik seperti bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan berdampak pada pembangunan di suatu daerah. Anggaran tersebut di berikan oleh pemerintah yang menjadikan pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu bidang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan bidang yang ditentukan. Semua perencanaan harus di dukung dengan adanya anggaran yang mencukupi, namun harus tepat sasaran dan tepat guna , dan di awasi dengan sepenuhnya agar semuanya terealisasi, dan akan menciptakan Kabupaten Langkat yang lebih maju lagi melalui SDM yang unggul dan kreatif.

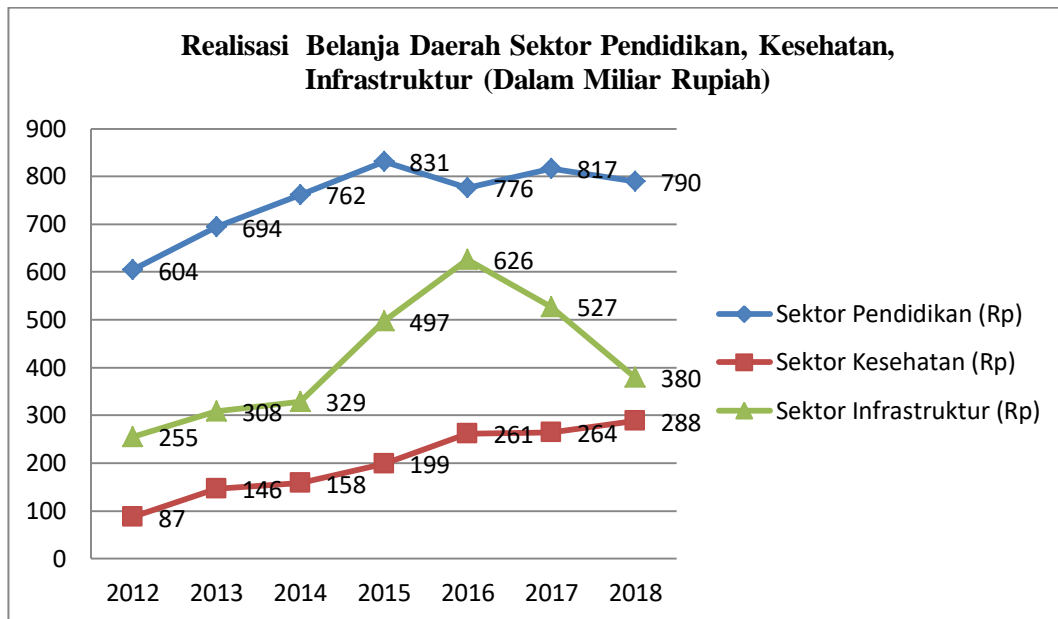
Maka dari itu untuk mengetahui perkembangan realisasi anggaran belanja daerah Kabupaten Langkat maka akan terlihat pada Tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3 Realisasi Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur (Dalam Rupiah), Indeks Pembangunan Manusia dan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Langkat Tahun 2012-2018

Tahun	Sektor Pendidikan (Rp)	Sektor Kesehatan (Rp)	Sektor Infrastruktur (Rp)	IPM (%)	Penyerapan Tenaga Kerja (Jumlah Orang)
2012	604.396.368.286,00	87.305.842.512,00	255.052.590.450,88	66,18	782
2013	694.837.871.435,00	146.553.563.434,00	308.212.154.953,43	67,17	891
2014	762.823.561.475,00	158.043.019.893,00	329.542.794.731,88	68	2496
2015	831.668.697.178,00	199.839.352.645,00	497.257.525.402,10	68,53	1914
2016	776.365.259.297,00	261.358.191.444,38	626.295.461.426,86	69,1	2206
2017	817.017.087.556,00	264.003.642.780,00	527.164.701.722,16	69,82	2973
2018	790.280.422.538,00	288.103.396.636,00	380.576.043.929,00	70,27	2805

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Langkat, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat.

Tabel di atas merupakan data yang di ambil secara akurat dimana Terdiri dari tiga instansi pemerintahan yaitu Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Langkat, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat. Data tersebut merupakan data dari tahun 2012 s/d 2018 dan telah di periksa kebenarannya oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD) Kabupaten Langkat, karena data ini harus melalui dinas BPPD terlebih dahulu sebelum ke instansi yang terkait dalam variabel penelitian. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa memang jika kita lihat secara keseluruhan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan baik pada sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, IPM maupun Penyerapan Tenaga Kerja. Jika kita jabarkan satu persatu yaitu di mulai dari sektor Pendidikan yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 menalami peningkatan yang sangat signifikan dimana dari 604 miliar menjadi 831 miliar Rupiah. Sedangkan tahun 2016 dan 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini mungkin saja terjadi karena memang kebutuhan dan keperluan setiap tahunnya memang berbeda-beda, hal inilah yang membuat angka realisasi belanja juga ikut menurun.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Langkat, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat.

Gambar 1.3 Grafik Realisasi Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur 2012-2018 (Dalam Miliar Rupiah)

Selanjutnya dapat kita lihat pada gambar 1.3 yaitu sektor Kesehatan dimana setiap tahun nya biaya dalam sektor Kesehatan terus meningkat, dari tahun 2012 s/d 2018 terus saja mengalami peningkatan. Adapun angka peningkatan tersebut ialah dari 87 miliar menjadi 288 miliar, sungguh peningkatan biaya belanja yang sangat besar. Dalam jangka waktu 7 tahun mengalami peningkatan sebesar 201 miliar rupiah. Hal ini di pengaruhi dengan pembangunan puskesmas maupun posyandu yang sudah ada di setiap kecamatan, desa, dan dusun yang tersebar di Kabupaten Langkat. Kebijakan ini di harapkan memberikan perubahan yang cepat dalam menjaga kesehatan masyarakat. Selanjutnya kita lihat pada sektor Infrastruktur yang juga mengalami peningkatan anggaran yaitu pada tahun 2012 s/d 2016 adapun angka dari sektor tersebut ialah 255 miliar pada tahun 2012 dan 626 miliar pada tahun 2016. Dan juga mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 527 miliar dan 380 miliar pada tahun 2018.

Hal ini memang dapat kita lihat bahwa pembangunan infrastruktur yang sangat pesat di Kabupaten Langkat, mulai dari pengaspalan jalan, irigasi, bangunan kantor di segala bidang dan berbagai fasilitas yang di harapkan mampu mempermudah akses dan si harapkan dapat menjadi tindakan langsung yang dapat memberikan pengaruh yang positif dari segi perekonomian masyarakat Kabupaten Langkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di lihat dari angka nya yaitu dari tahun 2012 s/d 2018 terus mengalami peningkatan, hal ini tentu saja menjadi harapan Pemerintah Kabupaten Langkat, dimana angka nya yaitu 66,18 % terus meningkat menjadi 70,27 % pada tahun 2018. Dari tingkat penyerapan tenaga kerja di kabupaten langkat juga dapat kita lihat pada tabel, secara keseluruhan jika kita lihat memang mengalami peningkatan mulai dari tahun 2012 s/d 2018, yaitu dari 782 menjadi 2805. Namun jika kita lihat rincian data dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang tidak stabil dimana dapat kita lihat bahwa penyerapan tenaga kerja belum begitu stabil jika kita lihat dari tahun ke tahun. Hal ini sangat mungkin terjadi, karena memang penyerapan tenaga kerja di pengaruhi banyak faktor pendukung, sehingga angka penyerapan tenaga kerja belum bisa stabil dari tahun ke tahun. Kita ketahui bahwa setiap pembangunan perlu adanya anggaran yang jelas di susun dan semua anggaran itu akan di ambil dari APBD masing-masing setiap daerah, khususnya Kabupaten Langkat.

Pendidikan adalah variabel yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa.. Berdasarkan pada UU Nomor 20 tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan secara Nasional, diamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warganegara tanpa

diskriminasi. Alokasi anggaran pendidikan dilakukan tiga jalur, yaitu yang pertama, Alokasi Anggaran Pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat . Alokasi anggaran pendidikan Pemerintah Pusat digunakan untuk penyediaan beasiswa untuk siswa kurang mampu, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru, serta pembangunan prasarana pendukung dan pemberian tunjangan profesi guru. Kedua, Alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah. Ketiga, Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan yang disebut dana pengembangan pendidikan nasional (DPPN).

Pada tahun 2002 adanya amandemen UUD 1945 tentang pendidikan, pasal 31 berbunyi:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan manusia yang diatur dalam undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional.

Menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh DPR pada tahun 2003 pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib terjamin tersedianya anggaran guna

penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Hal ini dicantumkan dalam Program Pendidikan 9 tahun yang mana Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan SD sampai SMP dengan cara membuat biaya pendidikan semurah-murahnya. Dari pernyataan Undang-Undang tersebut adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai pada tahun 2005. Program BOS ini diharapkan bisa membantu para siswa yang tidak mampu dan bisa melanjutkan pendidikannya yang terkendala dengan baik agar juga meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di daerah tersebut. Pendidikan dan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Berdasarkan perspektif ekonomi, sisi pentingnya mengenai faktor pendidikan dan kesehatan akan berkaitan dengan sumber daya manusia itu sendiri. Tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusianya ditentukan oleh status pendidikan, kesehatan dan banyaknya dibangun infrastruktur. Dalam kegiatan ekonomi, ketiga indikator kualitas sumber daya manusia tersebut khususnya produktivitas tenaga kerja.

Kesehatan adalah suatu kondisi yang sejahtera dan sehat dari fisik, batin maupun jiwa yang membuat manusia atau seseorang melakukan suatu kegiatan dan akan menghasilkan produktivitas dari kesehatan tersebut. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan kesehatan juga menjadi fundamental untuk membentuk manusia yang lebih baik pada pembangunan kesehatan yang baik juga. Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 pasal 171 menyatakan bahwa menjadikan alokasi belanja di bidang kesehatan mutlak di penuhi (*mandatory spending*). Pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan

anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN diluar gaji, sementara Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran Kesehatan sebesar 10% dari APBN diluar gaji.

Tujuan pembangunan bidang kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan yang harus terus-menerus membaik. Penggunaan anggaran dibidang kesehatan tersebut harus seoptimal mungkin dapat termanfaatkan bagi penggunanya dan tujuan tersebut tercapai dengan baik. Proporsi belanja kesehatan publik terhadap total belanja kesehatan di Indonesia dalam empat tahun terakhir, secara rata-rata hanya tercapai sekitar 46% dari total belanja kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa peran dari pemerintah pusat dan daerah dalam tujuan pembangunan kesehatan perlu dioptimalkan lagi.

Menurut lembaga WHO, kesehatan merupakan keadaan baik sepenuhnya secara fisik, mental, sosial. Kesehatan juga bukanlah karena tidak ada penyakit atau kelemahan dan bukan pula sekedar soal medis semata, melainkan menyangkut keadaan sosial di masyarakat. Pengertian sehat menurut UU Pokok Kesehatan No. 9 tahun 1960, Bab I Pasal 2 adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan (jasmani), rohani (mental), dan sosial, serta bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Batasan kesehatan tersebut di atas sekarang telah diperbaharui bila batasan kesehatan yang terdahulu itu hanya mencakup tiga dimensi atau aspek, yakni: fisik, mental, dan sosial, maka dalam Undang- Undang N0. 23 Tahun 1992, kesehatan mencakup aspek, yakni: fisik (badan), mental (jiwa), sosial, dan ekonomi. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan & RSUD) dan swasta

dalam Pelayanan Kesehatan serta luas wilayah Kabupaten Langkat yang relatif mudah dijangkau dengan kendaraan memberikan kemudahan kepada setiap penduduk di Kabupaten Langkat dan sekitarnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Infrastruktur merupakan salah satu sarana yang harus disediakan oleh pemerintah agar terlaksananya suatu pembangunan yang baik. Sarana yang dimaksud adalah adanya terbentuk berbagai macam bidang seperti transportasi, komunikasi dan perhubungan, air bersih, listrik, dan sebagainya. Pembangunan manusia yang baik tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dalam untuk meningkatkan investasi pada sumber daya manusia yang tidak asing lagi dengan perbaikan dalam pembangunan kualitas modal manusia itu sendiri. Ada beberapa alasan utama mengapa infrastruktur sangat penting untuk membangun sebuah integrasi ekonomi, antara lain sebagai berikut:

1. Ketersediaan infrastruktur merupakan faktor utama dalam pembangunan ekonomi disuatu daerah.
2. Memperoleh manfaat yang banyak dari integrasi sebuah ekonomi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangatlah penting untuk memperlancar aktivitas perdagangan dan sebuah investasi.
3. Harus memperhatikan perbaikan infrastruktur juga sangat penting dalam mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara, provinsi maupun antar suatu daerah.

Simon Kuznet menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan *public service obligation*, yaitu sesuatu yang harus menjadi kewajiban oleh pemerintah karena infrastruktur adalah bagian prasarana publik dan juga akan

mendukung kegiatan ekonomi suatu negara. Adanya ketersediaan infrastruktur ini yang dibuat oleh pemerintah sangat penting untuk menentukan tingkat keefisienan dan keefektifan dalam kegiatan ekonomi atau roda perekonomiannya berjalan dengan baik serta akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan produktivitas. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Langkat tidak akan berjalan tanpa adanya dengan kualitas yang handal dari sumber daya aparaturinya.

Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Langkat belum berjalan dengan maksimal seperti diantaranya infrastruktur berupa jalan, jembatan, drainase dan termasuk pelayanan publik. Infrastruktur merupakan roda penggerak suatu pertumbuhan ekonomi. pembangunan infrastruktur terdapat dua bagian yaitu infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi merupakan infrastruktur fisik baik yang digunakan dalam proses produksi maupun yang dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti meliputi prasarana umum yaitu telekomunikasi dan perhubungan, irigasi, air bersih, listrik, sanitasi dan serta pembuangan limbah. Infrastruktur sosial merupakan prasarana hanya meliputi kesehatan dan pendidikan. Dari segi infrastruktur sangat penting dalam suatu daerah. jika infrastruktur dibangun dengan baik maka perekonomian suatu daerah jalan dengan lancar, sebagaimana kehadiran infrastruktur ini dapat meningkatkan konektivitas sehingga memperlancar distribusi dan menurunkan biaya logistik barang dan jasa.

Berdasarkan hal diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **”Analisis Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara”**. Dengan adanya penelitian

tersebut, maka akan lebih jelas terlihat pengaruh dan faktor penyebab dari perkembangan suatu daerah khususnya daerah Kabupaten Langkat, mengingat Kabupaten Langkat merupakan daerah yang cukup luas dan menyimpan berbagai macam hasil bumi, baik dari sektor industri maupun dari hasil pertaniannya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka terbentuklah identifikasi masalah, adapun identifikasi masalah yang di tarik, yaitu sebagai berikut:

- a. Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat, seharusnya Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur lebih baik dari daerah lain yang ada di Sumatera Utara.
- b. Dengan Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur yang baik, diharapkan mampu mendongkrak perekonomian yang ada di Kabupaten Langkat melalui penyerapan tenaga kerja yang ada.

2. Batasan Masalah

Untuk mempersingkat dan menjelaskan permasalahan maka penulis membatasi masalah untuk lebih terperinci dan jelas sehingga pemecahannya terarah dan mempermudah proses penelitian. Penulis membatasi menganalisis belanja daerah sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Langkat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang yang sebelumnya di jelaskan, maka terdapat rumusan masalah yang dapat diambil sebagai kajian dalam penelitian yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah data dalam penulisan penelitian ini. Selain itu, rumusan masalah ini diperlukan sebagai suatu cara untuk mengambil suatu keputusan dari penulisan penelitian. Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Apakah belanja daerah sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur berpengaruh secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Langkat ?
2. Apakah belanja daerah sektor Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur berpengaruh secara langsung terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Langkat ?
3. Apakah belanja daerah sektor Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Langkat ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan isi pokok permasalahan yang sudah di rumuskan di atas maka adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh belanja daerah sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Langkat

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh belanja daerah sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Langkat.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh belanja daerah sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Langkat melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Langkat.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh belanja daerah di Kabupaten Langkat ini bukan semata hanya untuk kepentingan tugas akhir mahasiswa dalam menulis penulisan skripsi, tetapi bisa menjadi kepentingan bersama. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan dalam memahami bagaimana dana belanja daerah sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur mempengaruhi IPM dan Penyerapan Tenaga Kerja yang ada di Kabupaten Langkat.
2. Sebagai tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya, terkhusus penelitian di wilayah Kabupaten Langkat.
3. Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca khususnya mengenai belanja daerah, IPM, dan Tenaga Kerja di Kabupaten Langkat.

F. Keaslian Penelitian

Adapun referensi dari penulisan penelitian ini di dapat dari penelitian teman sekelas saya Agus Pardomuan LS (2019).Universitas Pembangunan

Pancabudi Medan, yang telah menyelesaikan Skripsi terlebih dahulu. Dalam penelitiannya yaitu “Analisis Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara”. Dalam penelitiannya ia memakai data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, dan metode yang digunakan Path Analysis. Dalam hasil analisisnya bahwa Pengeluaran Pemerintah daerah atas Pendidikan dan Kesehatan secara Analisis Jalur berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan, dan Pengeluaran Pemerintah daerah atas Infrastruktur secara Analisis Jalur tidak berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan. Adapun hal yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4 Originalitas Penelitian

No	Keterangan	Peneliti Terdahulu	Peneliti Sekarang
1	Lokasi Penelitian	Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
2	Tahun Penelitian	2019	2019
3	Data Penelitian	2010-2017	2012-2018
4	Metode Penelitian	Path Analysis	Path Analysis

Berdasarkan adanya perbedaan lokasi penelitian, dan data penelitian yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang sehingga ini sudah cukup menjadi pembeda yang sekaligus menjamin originalitas dari penelitian sekarang. Dan yang menjadi pembeda lainnya ialah adanya perbedaan satu variabel dari penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan atau yang mampu bekerja guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja dapat dilihat baik secara mikro maupun makro. Penyerapan Tenaga Kerja adalah jumlah tertentu dari tenaga kerja yang dipakai atau yang mampu di serap dalam suatu unit usaha tertentu juga. Penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh jumlah tenaga kerja yang akan diserap dalam usaha tertentu. Maka dari itu, kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja akan berbeda dalam satu unit usaha dengan usaha yang lainnya karena kemampuan usaha unit yang selalu berbeda-beda (Indayati, 2010).

Penyerapan tenaga kerja yang mungkin sedikit dipertimbangkan dalam fungsi produksi adalah substitusi. Menurut Handoko (Ridha, 2010 : 12), mengatakan bahwa penyerapan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh dua faktor seperti faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Sedangkan faktor internal adalah dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal dan pengeluaran non upah. Perusahaan akan memilih untuk tidak ingin menentukan upah minimum sehingga akan mempekerjakan tenaga kerja dengan cara menegosiasi, mengulang upah yang lebih rendah dengan cara

sifat penyerapan tenaga kerja merupakan pengganti dengan tenaga kerja yang lain, pemanfaatan pengangguran, dan tenaga kerja yang memakai sistem kontrak (Cahuc, 2008).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pada penyerapan tenaga kerja adalah adanya kebijakan dalam pengeluaran pemerintah yang dituangkan dalam APBD. Kebijakan pengeluaran pemerintah daerah dalam APBD tercermin dari total belanja daerah pemerintah yang dialokasikan dalam anggaran daerah tersebut. Pengeluaran pemerintah, investasi memiliki pengaruh terhadap pada penyerapan tenaga kerja (Alfiat, 2012). Adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah itu bersumber dari bantuan pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan bentuk dari akumulasi modal untuk pemerintah yang akan digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri.

Segala bentuk usaha untuk meningkatkan penyerapan juga tidak terlepas dari tujuan utama dari tenaga kerja tersebut yaitu peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja. Produktivitas Tenaga Kerja menjadi fokus utama dalam dunia usaha, dimana dalam meningkatnya jumlah tenaga kerja juga tidak boleh menyampingkan dari kinerja kerja yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi. Produktivitas mengandung pengertian filosofis, definisi kerja dan teknis operasional. Secara filosofis, produktivitas mengandung pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan, keadaan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan mutu kehidupan besok harus lebih baik dari hari ini. Menurut Siagian dan Agustin (2014) produktivitas kerja merupakan kemampuan yang menghasilkan barang/jasa dari berbagai sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh para pekerja.

Produktivitas dapat diartikan secara sederhana dengan peningkatan kualitas dan kuantitas, bisa juga diartikan bekerja secara efektif dan efisien. Karena itu antara produktivitas, efektif, efisien, dan kualitas sangat berdekatan. Artinya sumber-sumber ekonomi yang digerakkan secara efektif memerlukan keterampilan dan teknis sehingga mempunyai tingkat hasil guna yang tinggi. Produktivitas tenaga kerja memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, karena pendapatan nasional maupun pendapatan daerah banyak diperoleh dengan cara meningkatkan keefektifan dan mutu tenaga kerja dibandingkan dengan melalui formasi modal dan penambahan angkatan kerja. Pembinaan yang baik terhadap penduduk maupun angkatan kerja akan menghasilkan mutu angkatan kerja yang baik pula. Mutu angkatan kerja antara lain tercermin dalam tingkat pendidikan dan pelatihan yang mereka ikuti.

2. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam UNDP (United Nations Development Programme), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (“a process of enlarging people’s choices”). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP (Human Development Report, 1995:103)

Sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upayaupaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.

3. Komponen Pembangunan Manusia

Lembaga United Nations Development Programme (UNDP) telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran kuantitatif yang disebut Human Development Indeks (HDI). Meskipun HDI merupakan alat ukur pembangunan SDM yang dirumuskan secara konstan, diakui tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan SDM secara sempurna.

Adapun indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi HDI adalah sebagai berikut:

1. (UNDP, Human Development Report 1993: 105-106) • Longevity, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau life

expectancy of birth dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau infant mortality rate.

2. Educational Achievement, diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (adult literacy rate) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (the mean years of schooling).
3. Access to resource, dapat diukur secara makro melalui PDB riil perkapita dengan terminologi purchasing power parity dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen yang mempengaruhi IPM antara lain:

a) Indeks Harapan hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun, variabel tersebut diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung. Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak.

b) Indeks Hidup Layak

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP adjusted. Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan konsentrasi IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (Purchasing Power Parity).

- c) Indeks Pendidikan Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka LIT), dimana LIT merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok

penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

Menurut Todaro (2006:187) pembangunan manusia ada tiga komponen universal sebagai tujuan utama meliputi:

a) Kecukupan, yaitu merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan. Jika satu saja tidak terpenuhi akan menyebabkan keterbelakangan absolut.

b) Jati Diri, yaitu merupakan komponen dari kehidupan yang serba lebih baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak mengejar sesuatu, dan seterusnya. Semuanya itu terangkum dalam self esteem (jati diri).

c) Kebebasan dari Sikap Menghamba, yaitu merupakan kemampuan untuk memiliki nilai universal yang tercantum dalam pembangunan manusia adalah kemerdekaan manusia. Kemerdekaan dan kebebasan di sini diartikan sebagai kemampuan berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran dari aspek-aspek materil dalam kehidupan. Dengan adanya kebebasan kita tidak hanya semata-mata dipilih tapi kitalah yang memilih.

4. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Paradigma pembangunan menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari pembangunan, yaitu terjadinya penguasaan atas sumber daya, peningkatan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan (Suharto, 2010 : 73).

Rumus perhitungan IPM menurut Suharto, (2010 : 80) yaitu, sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks X (1)} + \text{Indeks X (2)} + \text{Indeks X (3)})$$

Dimana :

X (1) : Indeks harapan hidup

X (2) : Indeks pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata rata lama sekolah)

X (3) : Indeks standar hidup layak

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks X (i)} = (\text{X(i)} - \text{X(i) min}) / (\text{X(i) maks} - \text{X(i) min})$$

Dimana :

X (i) : Indikator ke-i (i = 1,2,3)

X (i) : Nilai maksimum X (i)

X (i) : Nilai minimum X (i)

Dalam Suharto, Nilai maksimum dan minimum indikator X (i).

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan reduksi Shortfall per tahun (*annual reduction in shortfall*) ukuran ini sederhana menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus ditempuh untuk mencapai titik ideal (IPM = 100). Prosedur penghitungan reduksi shortfall IPM (= r) dapat dirumuskan sebagai berikut:

Dimana :

IPM (t) : IPM pada tahun t

IPM (t+n) : IPM pada tahun t+n

IPM ideal : 100

5. Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2002 Pasal 1 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Menurut Sri Lesminingsih (Abdul Halim, 2001 : 199) menyebutkan bahwa pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah selama periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Pengelolaan belanja daerah ada tiga tujuan pokok yang ingin dicapai yaitu dengan menjamin dijalkannya disiplin fiskal melalui pengendalian belanja,

menyesuaikan alokasi anggaran dengan arah kebijakan anggaran dan prioritas anggaran, serta menjamin efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran. Pengelolaan belanja akan menyesuaikan arah kebijakan anggaran terutama yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah pusat atau daerah. Pengelolaan belanja daerah memang harus fokus kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran, berkeadilan, efisien dan efektif. Belanja daerah dibagi dua kelompok, yaitu:

a. Belanja Langsung.

Belanja langsung merupakan memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerintah daerah, seperti peningkatan jalan dan jembatan ruas kabupaten, pembangunan infrastruktur keciptakaryaan, tata ruang dan kebersihan, kemudian peningkatan infrastruktur pengairan.

b. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan penganggaran belanja yang tidak langsung, seperti belanja pegawai, belanja bunga, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Pasal 1 menyatakan bahwa keuangan negara yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyebutkan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPR. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, sedangkan penerimaan dan

pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

Dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa memprioritaskan semua perlindungan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang mewujudkan kedalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak untuk masyarakat dan mengembangkan layanan jaminan sosial. Untuk menciptakan modal manusia yang berkualitas dan bermutu, peran pemerintah sangat penting dalam mengalokasikan anggaran sektor pendidikan, kesehatan dan tidak lupa juga dengan infrastrukturnya. Adanya pengeluaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang dilakukan pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan keterampilan, kesehatan bagi masyarakat, pengetahuan dan sehingga akan mampu meningkatkan produktivitas yang tinggi dan juga akan bersaing dalam perekonomian. Dengan demikian, apabila ini terjadi terlaksana dengan baik dan menciptakan lingkungan yang baik maka memungkinkan masyarakat menikmati hidup yang baik, sehat, dan sehingga dapat meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi pada suatu daerah.

6. Belanja Daerah Dalam Sektor Pendidikan

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik melalui pendidikan. Pengeluaran pemerintah jika telah terealisasi dalam sektor pendidikan akan meningkatkan angka melek huruf dan lamanya dalam pendidikan yang di dapat diakses oleh masyarakat (Daegal, 2015). Pengeluaran pembangunan oleh

pemerintah seperti pembangunan gedung sekolah, subsidi dan lainnya. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terbagi subsektor yaitu antara lain pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, non formal dan informal, kedinasan, pendidikan keagamaan, litbang penelitian, pendidikan tinggi, pelayanan bantuan, pembinaan kepemudaan dan olahraga (Kemenkeu, 2017). Seperti halnya pengeluaran pemerintah Kabupaten Langkat disektor pendidikan adanya pengeluaran bidang pendidikan, keputakaan, kepemudaan dan olahraga.

Dalam hal ini terdapat alokasi pengeluaran pemerintah Kabupaten Langkat dalam sektor pendidikan seperti Program pelayanan adminitrasi perkantoran (penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, alat tulis kantor dan sebagainya), Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (pengadaan perlengkapan kantor, komputer dan sebagainya), Program pendidikan anak usia dini, Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Program pendidikan menengah, Program pendidikan non formal, Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan Program manajemen pelayanan pendidikan. Pentingnya sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat dilihat adanya alokasi pemerintah pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dengan adanya penyediaan alokasi bantuan pemerintah kepada semua masyarakat bisa memperoleh pendidikan bagus atau layak terutama masyarakat yang tidak mampu. Adanya alokasi pemerintah dibidang pendidikan untuk kepada masyarakat sehingga akan mendorong dan memajukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan melalui bidang pendidikan.

Menurut Rubenstein (2003) mengungkapkan bahwa kualitas pendidikan di suatu daerah dapat di ukur berdasarkan 2 faktor yaitu:

- a. Banyaknya jumlah sekolah, dengan asumsi bahwa walaupun sekolah tersebut miskin tetapi selama murid masih tertarik untuk bersekolah maka hal tersebut mengindikasikan bahwa minat murid untuk belajar sesuatu.
- b. *Literacy rate*, atau jumlah penduduk yang dapat baca tulis dari total seluruh jumlah penduduk yang ada. Di negara-negara maju *Literacy rate* mencapai hingga 95%.

Ketersediaan fasilitas pelayanan baik fisik maupun non fisik sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan di suatu daerah, dalam bidang fisik seperti ketersediaan sarana standart dalam pembangunan gedung pendidikan maupun sarana laboratorium, juga bidang non fisik seperti besar adanya bantuan biaya pendidikan. Pemerintah harus lebih fokus terhadap pendidikan sebagai faktor penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Jika halnya terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah dari sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 bahwa mengatakan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meningkatnya pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan akan berpengaruh terhadap

kemajuan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat keperguruan tinggi.

Ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan yang baik sangat mempengaruhi pada perkembangan suatu pendidikan di daerah itu sendiri, dalam bidang fisik seperti halnya ada ketersediaan sarana yang standart dalam pembangunan gedung pendidikan maupun sarana laboratorium, dan juga bidang non fisik seperti halnya ada bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat.

Peningkatan partisipasi sekolah tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang mamadai. Di tingkat pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), SD, SMP dan SMA, ini harus di tingkatkan dengan baik dan serius agar kiranya masyarakat mudah menyekolahkan anak-anak mereka sampai tamat pendidikannya. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sebab peningkatan produktivitas tenaga kerja yang bertujuan kepada pendidikan. Pada dasarnya bertujuan agar meningkatkan kemampuan kerja manusia dan untuk meningkatkan taraf hidup semua kalangan masyarakat.

Seperti pada umumnya bahwa seseorang yang memiliki tingkat pendidikannya yang lebih tinggi maka akan mempunyai ilmu pengetahuan yang baik dan luas dalam untuk meningkatkan kinerjanya. Pendidikan memiliki arti dalam meningkatkan merekrut tenaga kerja yang handal. Hal ini yang dimaksud adalah untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sebab pendidikan baik formal dan non formal seseorang diharapkan mempunyai kemampuan untuk lebih mengetahui dalam mengadaptasi dilingkungan kerjanya denagan lebih cepat.

7. Belanja Daerah Dalam Sektor Kesehatan

Pengeluaran pemerintah dibidang sektor kesehatan merupakan salah satu upaya mendapatkan kewajiban hak-hak masyarakat agar menerima pelayanan kesehatan yang layak (Kuncoro, 2013). Sama seperti halnya pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Langkat seperti bidang kesehatan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Dalam hal ini juga terdapat alokasi pengeluaran pemerintah Kabupaten Langkat dalam sektor kesehatan antara lain yaitu adanya Program obat dan perbekalan kesehatan, Program upaya kesehatan masyarakat, Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Program perbaikan gizi masyarakat, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, lansia dan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Melihat faktor manusia dari sisi kesehatan sebab kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan demikian kesehatan juga mempengaruhi kualitas manusia (Tjiptoherijanto dalam Astri, 2013). Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang anggaran kesehatan menyatakan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat mengalokasikan minimal 5% dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalokasikan minimal 10% dari APBD diluar gaji (Rumate, 2015).

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan demikian aspek kesehatan sangat mempengaruhi kualitas tubuh manusia. Semakin tinggi kesehatan pada masyarakat maka akan berpengaruh pada

kualitas sumber daya manusia yang berimplikasi dengan tujuan indeks pembangunan manusia (Setiawan, 2013). Jika manusia kekurangan vitamin, kalori, gizi, dan rendahnya keadaan tubuh manusia akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dan tidak bersemangat beraktivitas karena keadaan kesehatannya yang sangat rendah. Lembaga WHO dalam piagam Ottawa untuk promosi Kesehatan, mengatakan bahwa kesehatan adalah sumber daya bagi kehidupan sehari-hari, bukan tujuan kesehatan adalah konsep positif menekankan sumber daya sosial dan pribadi, serta kemampuan fisik. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, ditujukan agar semua lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah, merata, murah, dan terjangkau sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan mutu lingkungan permukiman dan perbaikan status gizi masyarakat diharapkan dapat tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang semakin membaik. Alokasi belanja daerah dibidang kesehatan mampu meningkatkan IPM artinya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dalam pembangunan kesehatan.

Berbagai studi bahwa membuktikan peningkatan kualitas sumber kesehatan masyarakat yang signifikan akan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Adanya alokasi pemerintah dibidang kesehatan diarahkan supaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat bisa terjangkau lebih luas dan merata sehingga betul-betul dirasakan oleh masyarakat setempat. Dengan kebijakan ini akan tercapai kualitas kesehatan masyarakat yang akan lebih baik lagi, sehingga diprediksi masyarakat akan lebih sehat dan tingkat produktivitas tenaga kerjanya akan meningkat. Hal ini disebabkan akan meningkatkan tingkat kerja seseorang, karena

masyarakat penduduk mampu dengan fisik dan mental. Peningkatan kualitas kesehatan juga salah satu faktor meningkatkan kinerja masyarakat itu sendiri.

8. Belanja Daerah Dalam sektor Infrastruktur

Dalam APBD, Infrastruktur di masukkan ke dalam Belanja Modal. Belanja modal antara lain:

- 1) Belanja Modal Tanah. Dimana dalam hal ini belanja modal tanah termasuk pengeluaran biaya seperti pembebasan lahan, sehingga tanah tersebut memang benar-benar siap di pakai sesuai maksud dan tujuan dari pembebasan lahan tersebut.
- 2) Belanja peralatan dan mesin. Biaya yang di keluarkan baik untuk penambahan unit maupun penggantian unit untuk peningkatan kapasitas peralatan dan mesin.
- 3) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk penambahan atau penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud.
- 4) Belanja modal fisik lainnya. Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa

beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku buku, dan masih banyak lain nya.

Infrastruktur pembangunan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi adalah infrastruktur fisik, baik yang digunakan dalam proses produksi maupun yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Artinya infrastruktur ekonomi tersebut meliputi semua prasarana umum seperti tenaga listrik, perhubungan, irigasi, telekomunikasi, air bersih, dan lain-lain. Sedangkan infrastruktur sosial yaitu yang mendukung kesejahteraan sosial meliputi prasarana kesehatan dan pendidikan (Ramelan, 1997).

Begitu juga halnya pemerintah Kabupaten Langkat mengalokasikan disektor infrastruktur seperti perencanaan pembangunan, perangkat daerah, komunikasi dan informatika. Dalam hal ini terdapat beberapa alokasi pemerintah Kabupaten Langkat dalam sektor Infrastruktur antara lain yaitu Program pembangunan saluran drainase atau gorong-gorong, Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, Program pembangunan jalan dan jembatan, Program pengembangan perumahan, Program lingkungan sehat perumahan dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang baik, mempunyai tingkat IPM yang baik pula, mempunyai laju pertumbuhan ekonomi yang baik juga, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa

penyediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan disuatu daerah atau secara nasional (Bappenas, 2003).

Perbaikan kualitas modal manusia tergantung adanya tersedia infrastruktur untuk menarik investasi pada sumber daya manusianya. Pada suatu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mampu melakukan pada pemerataan pembangunan kemudian akan melakukan pembangunan infrastruktur keseluruhan wilayah. Suatu perekonomian yang terintegrasi akan membutuhkan pembangunan infrastruktur (Daegal, 2015). Pada pembangunan transportasi dan perumahan merupakan barang publik yang harus disediakan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tersedianya perumahan yang layak huni akan membuat kualitas hidup masyarakat akan menjadi lebih baik dan makmur, karena perumahan yang layak dan mendukung kesehatan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Bidang transportasi yang terintegrasi dengan baik pula akan meningkatkan dan melancarkan distribusi kegiatan ekonomi dan juga meningkatkan jangka panjang yang menjadikan media pemerataan pembangunan daerah. Infrastruktur itu sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi serta penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur mempengaruhi sistem sosial dan sistem ekonomi dimasyarakat.

Pembangunan manusia sangat erat pada ketersediaan infrastruktur dalam menunjang investasi sumber daya manusia serta untuk perbaikan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Adanya pengeluaran pemerintah untuk bidang infrastruktur ini merupakan agar diharapkan masyarakat mampu meningkatkan ekonomi masing-masing dan jika infrastruktur ini berjalan

dengan baik maka kehidupan masyarakat akan mengalami hidup yang makmur, sejahtera dan Indeks Pembangunan Manusia selalu baik.

Menurut Daryanto (2012 : 41), mengatakan bahwa produktivitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil (jumlah barang dan atau jasa yang diproduksi) dengan sumber jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi, dan sebagainya untuk menghasilkan hasil tersebut. Ketersediaan infrastruktur disuatu wilayah atau daerah sangat penting, karena untuk membangun kualitas sumber daya manusianya supaya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan laju produktivitas kinerja disuatu daerah tersebut. Dan disinilah peran infrastruktur sangat penting dalam proses produksi. Hal ini alokasi pemerintah dalam bidang infrastruktur betul-betul terlaksana dengan baik agar dalam pembangunan dapat dilihat dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat penduduk dan dalam kinerjanya yang implikasinya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Infrastruktur memiliki peranan yang sangat besar dalam meningkatkan suatu perekonomian daerah tersebut, maka dari itu pembangunan bidang infrastruktur perlu untuk terus di dorong agar masyarakat penduduk akan merasakan adanya infrastruktur ini. Infrastruktur mempunyai sifat eksternalitas, sesuai dengan sifatnya maka dari itu infrastruktur disediakan oleh pemerintah dan bagi setiap pihak yang memakai infrastruktur tidak memberikan bayaran secara langsung atas penggunaan infrastruktur tersebut. Maksud dari infrastruktur yaitu seperti jalan, kesehatan, pendidikan, dan memiliki sifat eksternalitas yang positif. Dan memberikan dukungan kepada fasilitas yang ada agar dapat meningkatkan produktivitas suatu pekerja dan juga dalam proses produksinya

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisa	Hasil
1.	Santi Nurmainah (2013) Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. (Studi kasus 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah)	Belanja Modal, Tenaga Kerja, IPM, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan.	Analisis Jalur (Path Analysis)	1. Belanja modal pemerintah daerah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. 2. Tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. 3. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. 4. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. 5. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah

2.	Asya Yandi Dea Kristina (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (38 Kabupaten/K ota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2016).	PDRB, PAD, IPM, tenaga kerja	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini dengan model yang terpilih <i>Fixed Effect Model</i> menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 38.25679, IPM berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien sebesar -514690.0, tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 26.10263. sedangkan nilai koefisien determinasi (R ²) adalah 0.99 atau 99%.
3.	Agus Pardomuan LS (2019) Analisis Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Produktivitas	Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur , IPM, Produktifita s Tenaga Kerja	Analisis Jalur (Path Analysis)	1. Belanja Daerah Sektor Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja melalui Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai pengaruh langsung lebih kecil sebesar -0,135 dari nilai pengaruh tidak langsung sebesar -0,384 2. Belanja Daerah Sektor Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja

	<p>Tenaga Kerja Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara</p>		<p>melalui Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai pengaruh langsung sebesar 0,341 dari nilai pengaruh tidak langsung sebesar 0,608 3.</p> <p>3. Belanja Daerah Sektor Infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja melalui Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai pengaruh langsung sebesar 0,125 dari nilai pengaruh tidak langsung sebesar -0,056</p> <p>4. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Medan, artinya peningkatan IPM akan secara langsung menaikkan Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Medan secara signifikan.</p> <p>5. Pengeluaran Pemerintah daerah atas Pendidikan dan Kesehatan secara Analisis Jalur berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja melalui Indeks Pembangunan Manusia.</p>
--	---	--	--

				6. Pengeluaran Pemerintah daerah atas Infrastruktur secara Analisis Jalur tidak berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Indeks Pembangunan Manusia.
4.	Imam Dwi Prasetyo (2017) Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Belanja Daerah Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, IPM	Analisis Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil pengujian dan analisis atas data penelitian yang telah dilaksanakan, maka diperoleh simpulan bahwa variabel realisasi belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan, realisasi belanja pemerintah daerah fungsi kesehatan dan realisasi belanja pemerintah daerah fungsi infrastruktur dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) se-Sumatera.
5.	Ryan Andreas (2012) Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Investasi terhadap	Produktivitas tenaga kerja, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, dan Investasi	<i>Ordinary Least Square (OLS)</i>	Hasil analisis menunjukkan bahwa keseluruhan variabel independen (tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan investasi) memiliki kemampuan menjelaskan variasi produktivitas tenaga kerja selama kurun waktu 1990-2009 sebesar 75%, dan 25% dijelaskan oleh variabel

	Produktivitas tenaga kerja di Kota Medan.			lain diluar estimasi. Tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan investasi di estimasikan berpengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja. Secara parsial dapat dibuktikan bahwa variabel independen tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan investasi di estimasikan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja.
6.	Windhu Putra (2017) Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Perbatasan Indonesia	Penegeluaran Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, IPM	Analisis Jalur (Path Analysis)	. (1) Nilai koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan hubungan yang searah. Hal ini berarti bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat. (2) Nilai koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan hubungan yang searah. Hal ini bermakna bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi

				<p>kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(3) Nilai koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan hubungan yang tidak searah. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(4) Nilai koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan hubungan yang searah. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur memberikan kontribusi terhadap naiknya IPM kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(5) Nilai koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan hubungan yang searah. Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pada indeks pembangunan manusia kabupaten perbatasan di</p>
--	--	--	--	---

				<p>Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(6) Nilai koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan arah hubungan yang tidak searah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan akan memberikan kontribusi terhadap turunnya indeks pembangunan manusia kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat. (7) Nilai koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan arah Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 136 hubungan yang tidak searah. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan terhadap IPM di kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(8) Nilai koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan hubungan yang searah. Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, bidang pendidikan, bidang kesehatan</p>
--	--	--	--	--

				dan pertumbuhan ekonomi secara simultan menyebabkan naiknya indeks pembangunan manusia di kabupaten perbatasan.
7.	Abdul Kadir Mahulauw, Dwi Budi Santosa, Putu Mahardika (2016) Pengaruh Pengeluaran Kesehatan dan Pendidikan serta Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Maluku.	Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Pendapatan Perkapita, IPM	Analisis Jalur (Path Analysis)	Hasil analisis menunjukkan secara simultan bahwa ketiga jenis pengeluaran pemerintah tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPM dan ditemukan bahwa dengan R Square 68.1% dan 31.9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model secara parsial pendapatan perkapita sebagai variabel intervening tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM.
8.	Intan Safitri (2016) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan	Pengeluaran Sektor Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur, dan IPM	analisis <i>Random Effect Model (REM)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur memiliki pengaruh positif terhadap IPM dengan tingkat signifikansi yang berbeda-beda. Adapun pengeluaran pemerintah yang signifikan

	<p>Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. (ACEH)</p>			<p>terhadap IPM adalah pengeluaran sektor kesehatan, sedangkan pengeluaran sektor pendidikan dan infrastruktur tidak pengaruh signifikan. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat melakukan kebijakan-kebijakan sehingga pengeluaran dapat menjadi signifikan terhadap IPM dengan melakukan pengeluaran secara merata.</p>
9.	<p>Febri Aquariansyah (2018) Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung tahun 2010-2016 dalam persepektif Ekonomi Islam.</p>	<p>Pendidikan, kesehatan, dan IPM</p>	<p>Menggunakan analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Kemudian kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hasil uji F belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM.</p>

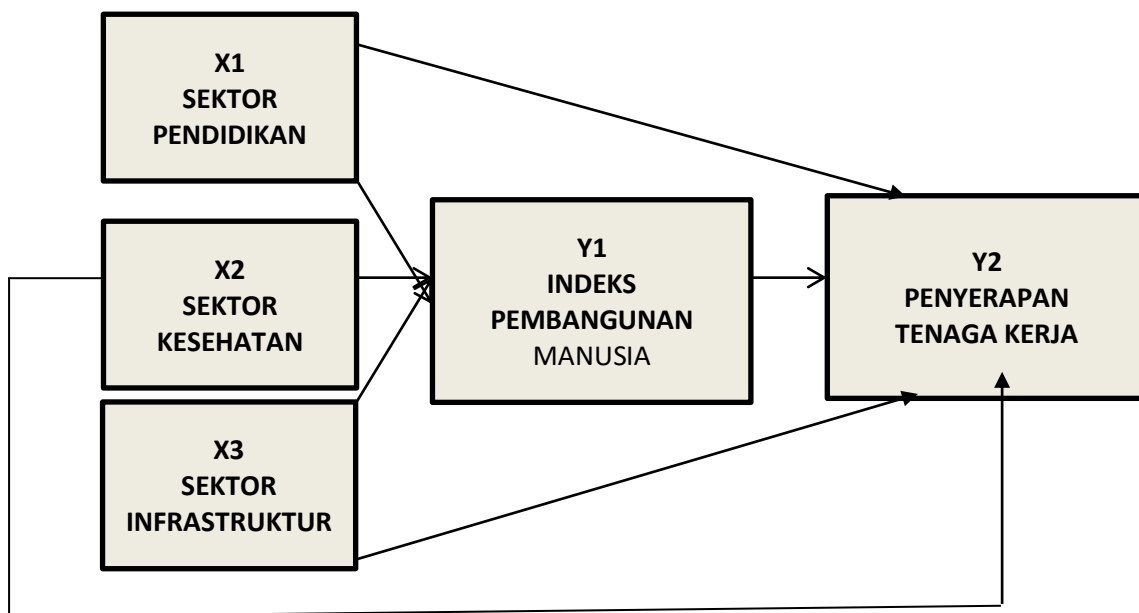
10.	<p>Septiana M.M. Sanggalorang, Vekie A. Rumate, Hanly F.DJ. Siwu (2015)</p> <p>Pengaruh pengeluaran Pemerintah disektor Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara.</p>	Pendidikan, Kesehatan, IPM	Menggunakan analisis Regresi Linier Berganda	<p>Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif, yaitu meningkat sebesar 0,870 dan secara statistik signifikan terhadap IPM. Dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif, yaitu sebesar -0,438 dan secara statistik tidak berpengaruh terhadap IPM di Sulawesi Utara.</p>
11.	<p>Muliza T. Zulham Chenny Seftarita (2017)</p> <p>Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan,</p>	IPM, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Kemiskinan, PDRB	Menggunakan analisis <i>Random Effect Model (REM)</i>	<p>Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, hal ini terjadi karena pemerintah kabupaten/kota masih lebih dominan mengalokasikan belanjanya yang pada jenis belanja yang secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap IPM. Sedangkan variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, maka denagan menurunnya tingkat</p>

	Tingkat kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh.			kemiskinan dapat meningkatkan IPM. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, yang berarti PDRB meningkat maka IPM juga akan meningkat.
12.	Nurvita Sari, Yulmard, Adi Bhakti (2016) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Produktivitas tenaga kerja terhadap Penyerapan tenaga kerja di Kota Jambi	Pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, Produktivitas tenaga kerja	<i>Ordinary Least Square (OLS)</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan produktivitas tenaga kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Jambi.

13.	Theresia Militina, Anis Rachma utary (2016) Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah daerah sektor Pendidikan dan Kesehatan serta Infrastruktur terhadap Pengangguran serta tingkat Kemiskinan.	Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur	Menggunakan analisis jalur (Path Analysis)	Menunjukkan bahwa dalam mempengaruhi tingkat pengangguran, pengeluaran anggaran bidang pendidikan berpengaruh langsung dan tidak signifikan. Pengeluaran bidang infrastruktur berpengaruh langsung dan tidak signifikan dan pengeluaran bidang kesehatan berpengaruh langsung dan tidak signifikan.
-----	--	---	--	---

C. Kerangka Konseptual

Dilihat dari pemaparan berbagai teori-teori yang dianggap berkaitan dengan rencana penelitian. Berdasarkan teori-teori yang mendukung tersebut, maka dalam penelitian ini menyatakan bahwa Pengeluaran Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Penyerapan Tenaga Kerja. Maka disusunlah kerangka konsep penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2. Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang menjadi objek penelitian dimana kebenarannya masih perlu dikaji dan diteliti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan perumusan diatas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

1. Belanja daerah sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Indeks pembangunan Manusia di Kabupaten Langkat.
2. Belanja daerah sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Langkat.
3. Belanja daerah sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Langkat melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Langkat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Metode analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui perkembangan dari setiap variabel penelitian, sedangkan metode analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis jalur (*Path Analysis*).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Yang bertempat di Ka. BPKAD dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat. Waktu penelitian ini di mulai dari 9 Desember 2019 sampai dengan 16 Desember 2019 . Untuk lebih jelasnya seperti dirincikan pada tabel berikut:

Tabel. 3.1 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas	Bulan/tahun					
		November 19	Desember 19	Januari – Agustus 20	Sept 20	Okt 20	Mei 21
1	Riset awal/pengajuan judul	■					
2	Pengambilan Data		■				
3	Penyusunan proposal			■			
4	Seminar proposal				■		
5	Penelitian					■	
6	Sidang						■

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional akan menjelaskan cara pengukuran variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, menggunakan skala ukuran yang diterima secara akademis. Penelitian ini menggunakan tiga variabel atau variabel endependen yang akan diukur yaitu, Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur, serta Indeks Pembangunan Manusia dan Penyerapan Tenaga Kerja sebagai variabel independen.

Tabel. 3.2 Definisi Operasional dan Indikator

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Belanja Daerah Sektor Pendidikan	Besarnya pengeluaran pemerintah dari total APBD yang dialokasikan dalam Sektor Pendidikan.	1. SDM 2. Belanja Modal
Belanja Daerah Sektor Kesehatan	Besarnya pengeluaran pemerintah dari total APBD yang dialokasikan dalam sektor kesehatan.	1. SDM 2. Belanja Modal
Belanja Daerah Sektor Infrastruktur	Besarnya pengeluaran pemerintah dari total APBD yang dialokasikan dalam sektor infrastruktur.	1. SDM 2. Belanja Modal
Indeks Pembangunan	Salah satu indikator	1. Angka harapan hidup

Manusia	komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia berdasarkan yang dikeluarkan oleh <i>United Nations Development Programme</i> (UNDP).	ketika lahir 2. Rata-rata lama sekolah (melek huruf di atas 15 tahun) 3. Hidup layak (daya beli)
Penyerapan Tenaga Kerja	Terserapnya tenaga kerja dalam jumlah tertentu pada suatu usaha tertentu.	1. Jumlah tenaga kerja terserap

D. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi, objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2014 : 80). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dengan mengambil laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat

E. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan runtun waktu (*time series*). Data sekunder merupakan diperoleh oleh peneliti melalui banyak mencari sumber yang sebelumnya sudah ada atau data yang langsung. Sumber data dalam

penelitian ini diperoleh dari kantor dinas BPKAD Kabupaten Langkat dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mengolah data dari informasi terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data diperoleh tahun 2012 sampai dengan 2018 (7 tahun).

G. Metode Analisa Data

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai jenis dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Path Analysis (analisis jalur). Analisis jalur bertujuan untuk membuktikan hipotesis, yaitu membuktikan apakah Belanja daerah sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur menjadi variabel utama dalam mendukung dari Indeks Pembangunan Manusia dan Penyerapan Tenaga Kerja, dengan persamaan sebagai berikut :

Persamaan Aplikasi

$$\text{Persamaan 1} \quad Y_1 = \text{PY}_1\text{X}_1 + \text{PY}_1\text{X}_2 + \text{PY}_1\text{X}_3 + e$$

$$\text{Persamaan 2} \quad Y_2 = \text{PY}_2\text{X}_1 + \text{PY}_2\text{X}_2 + \text{PY}_2\text{X}_3 + e$$

$$\text{Persamaan 3} \quad Y_2 = \text{PY}_2\text{X}_1 + \text{PY}_2\text{X}_2 + \text{PY}_2\text{X}_3 + \text{PY}_2\text{Y}_1 + e$$

Keterangan :

Y1	= Indeks Pembangunan Manusia
Y2	= Penyerapan Tenaga Kerja
X1	= Sektor Pendidikan
X2	= Sektor Kesehatan
X3	= Sektor Infrastruktur
ϵ	= <i>Error Term</i> / Tingkat Kesalahan

Analisis Jalur (Path Analysis) didukung oleh uji mediasi. Uji Mediasi bertujuan untuk menguji apakah variabel intervening berfungsi sebagai mediasi atau perantara. Dengan syarat :

$P1 < P2 \times P3$ atau (pengaruh langsung < pengaruh tidak langsung) maka H_a diterima

$P1 > P2 \times P3$ atau (pengaruh langsung > pengaruh tidak langsung) maka H_a ditolak

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara gabungan (simultan) berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Besarnya pengaruh ialah 98,9%. Besarnya pengaruh variabel lain di luar model regresi tersebut dihitung dengan rumus : $1 - r^2$ atau $1 - 0,989$ atau sebesar 1,1%..
2. Secara masing-masing (parsial), pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia,
3. Secara masing-masing (parsial), variabel infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
4. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara gabungan (simultan) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
5. Secara masing-masing (parsial), Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
6. Indeks Pembangunan Manusia menjadi variabel yang memediasi/intervening antara Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, maka Indeks Pembangunan Manusia berfungsi sebagai variabel intervening.

7. Indeks Pembangunan Manusia menjadi variabel yang memediasi/intervening antara Sektor kesehatan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, maka Indeks Pembangunan Manusia berfungsi sebagai variabel intervening.
8. Secara parsial infrastruktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, dan tidak layak dilakukan interpretasi lebih lanjut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka adapun beberapa saran yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Langkat harus dapat menetapkan kebijakan-kebijakan terutama mengenai pembagian Anggaran Belanja Daerah agar alokasi tepat sasaran dan memiliki pengaruh yang positif untuk menjadikan Kabupaten Langkat menjadi lebih maju.
2. Untuk Pemerintah Kabupaten Langkat di harapkan mampu meningkatkan Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur di tahun yang akan datang.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar melanjutkan penelitian dengan menambah jumlah variabel dan rentang waktu penelitian agar memperoleh hasil yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, R. 2012. Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Investasi Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Di Kota Medan. *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. *Yogyakarta*: STIE YKPN
- Aquariansyah, F. 2018. Analisis pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2016 dalam Persepektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Abjan. 2016. Determinasi Anggaran Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal*. Ternate: Universitas Khairun.
- Aditia, A, Ni Putu Martini Dewi. 2018. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*: Universitas Udayana Bali.
- Adhadika, T., Arif Pujiyono. 2014. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas tenaga Kerja Industri Pengolahan Di Kota Semarang.
- Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.2017. *Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Derah* . Januari. BPKAD Langkat. Stabat.
- Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.2018. *Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Derah* . Januari. BPKAD Langkat. Stabat.
- Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.2019. *Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Derah* . Januari. BPKAD Langkat. Stabat.
- Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.2013. *Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Derah* . Januari. BPKAD Langkat. Stabat.
- Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.2014. *Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Derah* . Januari. BPKAD Langkat. Stabat.
- Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.2015. *Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Derah* . Januari. BPKAD Langkat. Stabat.
- Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.2016. *Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Derah* . Januari. BPKAD Langkat. Stabat.
- Badan Pusat Statistik.2019. *Laporan Indeks Pembangunan Manusia* . Februari. BPS Sumut. Medan

- Badan Pusat Statistik.2019. *Laporan Indeks Pembangunan Manusia* . Februari. BPS Sumut. Medan.
- Chodariyanti, L. 2016. Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Jawa Timur: Universitas Islam Lamongan.
- Fridhowati, dkk. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Pulau Jawa. *Jurnal*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Fauji, Z. 2017. Pengaruh Belanja Bidang Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. *Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung.
- Kahang, M., dkk. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Samarinda*: Universitas Mulawarman.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Pelayanan Dasar, Pendidikan, Kesehatan, Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum*. 2006. Jakarta.
- Putri, D.K.A.Y, Sri Kusreni. 2017. Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Dan Upah Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*: Universitas Airlangga.
- Rahmat, S. 2018. Dampak Perubahan Budaya Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan pada Masyarakat Desa Pahlawan. *Jurnal JEPA*: Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Rembet, T.S, Vekie A. Rumate, George M. V. Kawung. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun (2005-2014). *Jurnal Manado*: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Rahmat, S. 2018. Pengaruh Nilai Tukar Nelayan (Pendapatan Nelayan, Pendapatan Non Nelayan, Pengeluaran Nelayan, Pengeluaran Non Nelayan) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Pendidikan, Kondisi Fisik Rumah) Di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram. *Jurnal JEPA*: Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Rangkuty, D. M., & Sari, M. M. (2019). Analisis Utang Luar Negeri dan Inflasi Indonesia. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 19(1), 57-66.

- Siahaan, A. P. U., Nasution, M. D. T. P., & Aryza, S. (2018). Dependence of Poverty Dependence on Indonesian Economic Fundamentals.
- Siahaan, A. P. U. Strategy for Improving Science and Welfare Through Community Empowerment Technology (IJCIET).
- Sanusi, A, Mohammad Yusuf. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah Di Sumatera Utara Tahun 2013-2015 Pendekatan Panel Regression. *Jurnal JEPA*: Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Sembiring, M., & Lubis, A. R. (2021). Effective combination of palm oil plant waste and animal waste with bio-activator EM4 produces organic fertilizer. *Commun. Math. Biol. Neurosci.*, 2021, Article-ID.
- Sugiarto. 2013. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*: Universitas Syah Kuala.
- Safitri, I. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh. *Jurnal Banda Aceh*: Universitas Syiah Kuala.
- Sidubatar, Dwindi. 2013. Pengaruh Belanja Kesehatan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2008-2010. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sugiarto. 2013. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*: Universitas Syah Kuala.
- Sunarni. 2017. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se-Indonesia. *Jurnal. Bandar Lampung*: Universitas Lampung.
- Suparno, H. 2014. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur. *Skripsi*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Sanggalorang, M. M . S, Vakie A. Rimate, Hanly F. DJ. Siwu. 2015. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara. *Jurnal Manado*: Universitas Sam Ratulangi Manado
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. *Ketenagakerjaan*. 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 . Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Pasal 1. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 . Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49. *Sistem Pendidikan Nasional*. 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 . Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009. *Anggaran Kesehatan*. 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 . Jakarta